



Katalog: 3205022
ISSN 2502-7484

2025

PENGHITUNGAN DAN ANALISIS

Kemiskinan Makro di Indonesia

Volume 17, 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 3205022
ISSN 2502-7484

2025

PENGHITUNGAN DAN ANALISIS

Kemiskinan Makro di Indonesia

Volume 17, 2025

PENGHITUNGAN DAN ANALISIS

Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2025

Volume 17, 2025

Katalog : 3205022
ISSN : 2502-7484
Nomor Publikasi : 04300.25009

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xiv+73 halaman

Penyusun Naskah : Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
Penyunting : Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
Pembuat Kover : Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
Sumber Ilustrasi : canva.com
Penerbit : ©Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan,
mengkomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi
buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin
tertulis dari Badan Pusat Statistik

”



TIM PENYUSUN

PENGHITUNGAN DAN ANALISIS Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2025

Volume 17, 2025

Pengarah:

Ateng Hartono

Penanggung Jawab:

Nurma Midayanti

Penyunting:

Nur Sahrizal

Penulis Naskah:

Nuri Taufiq

Mardiana Fitria

Ayesha Tantriana

Lili Retnosari

Tsuraya Mumtaz

I Made Giri Suyasa

Pengolah Data:

Nuri Taufiq

I Made Giri Suyasa

Penata Letak:

Tsuraya Mumtaz



Tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri.

Prabowo Subianto – Presiden Republik Indonesia 2024–2029



KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan isu global dan juga nasional yang terus menjadi perhatian berbagai pihak. Untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan, diperlukan beragam indikator yang mampu menggambarkan kondisi dan perkembangan penduduk miskin di Indonesia. Indikator tersebut mencakup jumlah dan persentase penduduk miskin, serta berbagai karakteristik kemiskinan lainnya yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah.

Publikasi “Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2025” menyajikan metodologi, hasil penghitungan, serta analisis angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia tahun 2025. Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, baik modul inti (KOR) maupun modul konsumsi dan pengeluaran.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan dukungan berbagai pihak, mulai dari petugas lapangan hingga tim pengolah dan analisis data. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan dalam memahami kondisi kemiskinan di Indonesia dan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.



Jakarta, November 2025
Kepala Badan Pusat Statistik

A handwritten signature in black ink, dated 19/11.

Amalia Adininggar Widayanti

DAFTAR ISI

Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2025

Volume 17, 2025

Halaman

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
 I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Penulisan	4
1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 II. KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA.....	 7
2.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan,	9
2.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan,.....	15
2.3 Indeks Keparahan Kemiskinan,	16
 III. KETIMPANGAN PENGELUARAN DI INDONESIA	 19
3.1 <i>Gini Ratio</i>	21
3.2 Indeks Theil	22
3.3 Indeks L	23
3.4 Distribusi Pengeluaran	25
 IV. PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN DI INDONESIA.....	 29
4.1 Karakteristik Sosial Demografi	31
4.2 Karakteristik Pendidikan	33
4.3 Karakteristik Ketenagakerjaan	34
4.4 Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)	37
4.4.1 Luas Lantai	37



Halaman

4.4.2 Jenis Lantai	38
4.4.3 Jenis Atap	38
4.4.4 Jenis Dinding	39
4.4.5 Jenis Penerangan	40
4.4.6 Sumber Air	41
4.4.7 Jenis Jamban	42
4.4.8 Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal	43
 V. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA.....	45
5.1 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako	47
5.2 Program Indonesia Pintar (PIP)	48
5.3 Program Keluarga Harapan (PKH)	49
 Daftar Pustaka	51
Catatan Teknis	55
Lampiran	65

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Garis Kemiskinan Menurut Daerah dan Komponennya (Rp/kapita/bulan), Maret 2024–Maret 2025	9
Tabel 2.2	Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah (Rp/kapita/bulan), Maret 2025	10
Tabel 2.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2024–Maret 2025	11
Tabel 2.4	<i>Head Count Index</i> Menurut Jenis Kelamin dan Umur Penduduk, Maret 2024–Maret 2025	12
Tabel 2.5	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2025.....	12
Tabel 2.6	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 2006–2025.....	14
Tabel 3.1	Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, 2015–2025	26
Tabel 3.2	Persentase Pembagian Pengeluaran Menurut Kelas Kuintil dan Daerah, 2024–2025	27
Tabel 4.1	Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin menurut Daerah, 2025	31
Tabel 4.2	<i>Head Count Index</i> Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2025	32
Tabel 4.3	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga dan Daerah, 2025	33
Tabel 4.4	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga dan Daerah, 2025.....	34
Tabel 4.5	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Sumber Penghasilan Utama Kepala Rumah Tangga dan Daerah, 2025.....	35
Tabel 4.6	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga dan Daerah, 2025	36

Tabel

Halaman

Tabel 4.7	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Daerah dan Luas Lantai per Kapita (m ²), 2025	37
Tabel 4.8	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Daerah dan Jenis Lantai Terluas, 2025	38
Tabel 4.9	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Daerah dan Jenis Atap Terluas, 2025	39
Tabel 4.10	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Daerah dan Jenis Dinding Terluas, 2025 ..	40
Tabel 4.11	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Daerah dan Sumber Penerangan Rumah, 2025	41
Tabel 4.12	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Daerah dan Sumber Air Minum Layak Rumah Tangga, 2025	42
Tabel 4.13	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Daerah dan Jenis Jamban Rumah Tangga, 2025.....	43
Tabel 4.14	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Daerah dan Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal, 2025	44
Tabel 5.1	Persentase Rumah Tangga Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako Menurut Desil Pengeluaran dan Daerah, 2025	47
Tabel L 1	Daftar Komoditi Kebutuhan Dasar Makanan, Maret 2025	67
Tabel L 2	Daftar Komoditi Kebutuhan Dasar Bukan Makanan, Maret 2025	69
Tabel L 3	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan Menurut Provinsi, Maret 2025	70
Tabel L 4	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaan Menurut Provinsi, Maret 2025.....	71
Tabel L 5	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, Maret 2025	72

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 2006–2025	14
Gambar 2.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2024–Maret 2025	15
Gambar 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), 2006–2025	16
Gambar 2.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2024–Maret 2025	16
Gambar 2.5 Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2), 2006–2025	17
Gambar 3.1 <i>Gini Ratio</i> di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2024–Maret 2025	21
Gambar 3.2 <i>Gini Ratio</i> di Indonesia Menurut Daerah, 2016–2025	22
Gambar 3.3 Indeks Theil di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2024–Maret 2025	22
Gambar 3.4 Indeks Theil di Indonesia Menurut Daerah, 2016–2025	23
Gambar 3.5 Indeks-L di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2024–Maret 2025	24
Gambar 3.6 Indeks-L di Indonesia Menurut Daerah, 2016–2025	24
Gambar 3.7 Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 Persen Terendah Menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, Maret 2024–Maret 2025	25
Gambar 5.1 Persentase Rumah Tangga Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Menurut Kuintil Pengeluaran per Kapita/Bulan, 2025	47
Gambar 5.2 Persentase Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Kuintil Pengeluaran per Kapita/Bulan, 2025	48
Gambar 6.1 Koefisien Gini Menurut Kurva Lorentz	58

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang tetap solid di tengah dinamika ekonomi global. Aktivitas ekonomi domestik menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sepanjang tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh stabil pada kisaran 5 persen, didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta peningkatan aktivitas di sektor jasa. Stabilitas makroekonomi yang terjaga menjadi prasyarat penting dalam mendukung upaya penurunan kemiskinan.

Sejalan dengan perbaikan kondisi ekonomi, indikator kemiskinan menunjukkan tren penurunan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen, menurun 0,56 poin persentase dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 9,03 persen. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang, berkurang 1,37 juta orang dibandingkan Maret 2024 yang sebanyak 25,22 juta orang.

Dari sisi wilayah, penurunan kemiskinan terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 7,09 persen pada Maret 2024 menjadi 6,73 persen pada Maret 2025. Di perdesaan, persentase penduduk miskin menurun dari 11,79 persen menjadi 11,03 persen pada periode yang sama. Jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang sekitar 0,37 juta orang, sedangkan di perdesaan menurun satu juta orang.

Garis Kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp609.160,00 per kapita per bulan, meningkat 4,5 persen dibandingkan Maret 2024. Komposisi Garis Kemiskinan masih didominasi oleh Garis Kemiskinan Makanan sebesar 74,58 persen, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan berkontribusi sebesar 25,42 persen. Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 4,72 orang, nilai Garis Kemiskinan per rumah tangga setara dengan Rp2.875.235,00 per bulan.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur menggunakan *gini ratio* juga menunjukkan perbaikan. *Gini ratio* nasional pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,375, menurun dari 0,379 pada Maret 2024. Ketimpangan di perkotaan turun dari 0,399 menjadi 0,395, sedangkan di perdesaan menurun dari 0,306 menjadi 0,299.

Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin ekstrem yang mengacu pada garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia sebesar US\$2,15 (2017 PPP) per kapita per hari tercatat sebesar 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta orang. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar 0,99 persen atau 2,78 juta orang. Penurunan ini menunjukkan kemajuan nyata menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Secara keseluruhan, penurunan tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan ketimpangan pada tahun 2025 mencerminkan hasil positif dari stabilitas ekonomi makro, peningkatan efektivitas program perlindungan sosial, serta perbaikan



kualitas data sasaran. Ke depan, sinergi kebijakan antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penguatan program pengentasan kemiskinan perlu terus dijaga untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh.

<https://www.bps.go.id>

BAB 1

Pendahuluan

*Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro
di Indonesia 2025*

1 Latar Belakang

2 Tujuan Penulisan

3 Ruang Lingkup dan
Sumber Data

4 Sistematika
Penulisan



1.1 Latar Belakang

Mengakhiri Kemiskinan di Segala Bentuk dan Dimensi

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan terbesar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional dan global. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) menegaskan komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan di mana pun. Komitmen tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional Indonesia yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada periode RPJMN 2020–2024, strategi pengurangan kemiskinan menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional. Upaya ini semakin diperkuat dalam RPJMN 2025–2029, melalui prioritas nasional “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”. Pendekatan ini menegaskan pentingnya pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis masyarakat, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh kelompok penduduk.

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia berkomitmen kuat untuk mewujudkan target SDGs, khususnya terkait kemiskinan. Salah satu langkah krusial dalam mencapai hal ini adalah peningkatan kualitas data kemiskinan. Data yang akurat dan terperinci diharapkan mampu menjadi dasar bagi kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif. Dengan begitu, visi Indonesia tanpa kemiskinan bukan hanya cita-cita, tetapi tujuan yang bisa dicapai melalui kebijakan yang tepat dan berbasis data.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984, menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Modul Konsumsi untuk periode 1976–1981. Sejak saat itu, data kemiskinan rutin dikeluarkan setiap tiga tahun. Pada tahun 2002, BPS mulai menerbitkan data kemiskinan setiap tahun, baik untuk daerah perkotaan maupun perdesaan, guna memberikan gambaran yang lebih aktual dan komprehensif mengenai dinamika kemiskinan di Indonesia.

Penghitungan kemiskinan oleh BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), di mana kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, yang diukur berdasarkan garis kemiskinan. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai miskin.



Pandemi Covid-19 telah memperburuk kondisi ekonomi global, termasuk di Indonesia, dan berdampak langsung pada kesejahteraan penduduk. Di tengah tantangan ini, data kemiskinan menjadi alat penting bagi para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi dan merespons kondisi masyarakat yang paling rentan. Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan yang tepat dan *up-to-date* semakin penting untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat membantu mempercepat pemulihan dan memperbaiki kondisi hidup masyarakat miskin di Indonesia.

Menurut Haughton & Khandker (2009), ada empat alasan mengukur kemiskinan yaitu:

1. Instrumen yang Kuat untuk Pembuat Kebijakan

Pengukuran kemiskinan berfungsi sebagai alat yang efektif untuk membantu pembuat kebijakan memusatkan perhatian pada peningkatan kehidupan orang miskin.

2. Identifikasi Orang Miskin untuk Intervensi yang Tepat

Dengan mengukur kemiskinan, kita dapat secara tepat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling rentan. Hal ini memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

3. Memantau dan Mengevaluasi Program

Pengukuran kemiskinan juga penting untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan.

4. Mengevaluasi Kinerja Lembaga

Selain itu, pengukuran kemiskinan digunakan untuk menilai kinerja lembaga-lembaga yang memiliki misi membantu masyarakat miskin. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut menjalankan tugas mereka secara efektif dalam mendukung pengentasan kemiskinan.

1.2 Tujuan Penulisan

Publikasi “Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2025” disusun dengan tujuan mendukung penyediaan data kemiskinan. Publikasi ini berupa penyajian data jumlah dan persentase penduduk miskin, distribusi dan ketimpangan penduduk, profil kemiskinan, dan gambaran umum program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen/pengguna akan data dan informasi yang berkaitan dengan indikator kemiskinan. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah dapat terus dipantau dari waktu ke waktu.

1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Publikasi ini mencakup analisis tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025, dengan pembagian menurut wilayah perkotaan dan perdesaan. Selain itu, publikasi ini menyajikan berbagai karakteristik rumah tangga miskin dan tidak miskin, distribusi penduduk, serta tingkat ketimpangan pengeluaran. Beberapa indikator kemiskinan lainnya juga disertakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR dan Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (KP) Maret 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari publikasi ini adalah sebagai berikut:

Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Bab III membahas tentang ketimpangan pengeluaran di Indonesia yang dijelaskan melalui *gini ratio*, indeks Theil, indeks L, dan ketimpangan menurut kriteria Bank Dunia.

Bab IV membahas tentang profil rumah tangga miskin Indonesia, dari sisi sosial demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan tempat tinggal (perumahan).

Bab V menjelaskan beberapa program penanggulangan kemiskinan, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain itu, pada bagian lampiran juga disajikan tabel pendukung dan catatan teknis terkait metode penghitungan kemiskinan dan ketimpangan.

BAB 2

Kondisi Kemiskinan di Indonesia

Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2025

Tingkat Kemiskinan



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2025

Persentase Penduduk Miskin (P0)



8,47 persen

Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen, **menurun 0,56 persen poin** dibanding Maret 2024.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)



1,365

Pada Maret 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 1,365; **menurun** dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 1,461.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)



0,319

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Maret 2025 sebesar 0,319; **menurun** dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,347.

2.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Garis Kemiskinan Terus Mengalami Peningkatan

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Pada tabel 2.1, terlihat bahwa selama Maret 2024-Maret 2025, garis kemiskinan nasional mengalami peningkatan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Garis kemiskinan nasional meningkat sebesar 4,50 persen, dari Rp582.932,00 per kapita per bulan pada Maret 2024, menjadi Rp609.160,00 per kapita per bulan pada Maret 2025. Sementara itu, garis kemiskinan di perkotaan naik sebesar 4,60 persen, dan perdesaan naik sebesar 4,22 persen.

Tabel 2.1 Garis Kemiskinan Menurut Daerah dan Komponennya (Rp/kapita/bulan), Maret 2024 dan Maret 2025

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan		
	Makanan (GKM)	Non-Makanan (GKNM)	Total (GK)
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2024	441.394	160.477	601.871
Maret 2025	463.801	165.760	629.561
Perdesaan			
Maret 2024	424.160	132.714	556.874
Maret 2025	441.494	138.855	580.349
Perkotaan + Perdesaan			
Maret 2024	433.906	149.026	582.932
Maret 2025	454.299	154.861	609.160

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret 2024 dan Maret 2025

Provinsi dengan Garis Kemiskinan Tertinggi dan Terendah

Dari tabel 2.2 terlihat bahwa pada Maret 2025, Papua Pegunungan menjadi provinsi yang mempunyai garis kemiskinan tertinggi yaitu Rp1.132.178,00 per kapita per bulan. Sementara itu, Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan garis kemiskinan terendah yaitu Rp475.488,00 per kapita per bulan. Jika dirinci menurut daerah perkotaan maupun perdesaan, garis kemiskinan tertinggi tercatat di Provinsi Papua Pegunungan, yakni sebesar Rp1.454.372,00 per kapita per bulan di perkotaan, dan Rp1.115.070,00 per kapita per bulan di perdesaan. Sementara itu, garis kemiskinan perkotaan yang terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar Rp473.493,00 per kapita per bulan dan garis kemiskinan perdesaan terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar Rp456.048,00 per kapita per bulan.

Tabel 2.2 Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah (Rp/kapita/bulan), Maret 2025

Provinsi	Garis Kemiskinan		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	716.522	655.435	676.247
Sumatera Utara	694.542	630.844	666.546
Sumatera Barat	753.614	704.232	729.806
Riau	758.174	683.064	713.117
Jambi	759.799	618.121	664.127
Sumatera Selatan	624.550	557.253	581.702
Bengkulu	754.967	650.887	683.820
Lampung	659.660	588.958	612.451
Bangka Belitung	926.156	995.150	956.833
Kepulauan Riau	835.161	797.450	832.410
DKI Jakarta	852.768	–	852.768
Jawa Barat	550.729	535.726	547.752
Jawa Tengah	546.576	527.934	537.812
DI Yogyakarta	653.421	545.206	626.363
Jawa Timur	576.188	534.771	558.029
Banten	700.646	611.976	684.232
Bali	631.180	542.858	607.847
Nusa Tenggara Barat	574.051	537.105	556.846
Nusa Tenggara Timur	666.633	508.645	549.607
Kalimantan Barat	669.721	595.174	622.882
Kalimantan Tengah	634.029	667.001	654.066
Kalimantan Selatan	662.876	637.314	650.675
Kalimantan Timur	876.210	843.168	866.193
Kalimantan Utara	921.520	829.827	884.970
Sulawesi Utara	546.021	510.678	530.304
Sulawesi Tengah	638.441	617.865	624.854
Sulawesi Selatan	502.530	456.048	477.966
Sulawesi Tenggara	520.957	467.814	488.171
Gorontalo	503.854	487.598	495.576
Sulawesi Barat	473.493	476.004	475.488
Maluku	781.403	738.005	757.600
Maluku Utara	711.096	642.614	662.397
Papua Barat	959.457	769.107	831.001
Papua Barat Daya	835.719	782.579	812.630
Papua	797.056	599.432	714.365
Papua Selatan	703.304	472.503	566.052
Papua Tengah	1.011.257	757.877	817.834
Papua Pegunungan	1.454.372	1.115.070	1.132.178
INDONESIA	629.561	580.349	609.160

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2025 Turun Dibanding Tahun 2024

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta jiwa (8,47 persen), turun 1,37 juta orang dibanding Maret 2024 yang sebesar 25,22 juta orang (9,03 persen). Selama periode Maret 2024–Maret 2025, jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun sebanyak 0,37 juta orang, sedangkan di perdesaan menurun sebanyak 1,00 juta orang (Tabel 2.3).

Tabel 2.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2024 dan Maret 2025

Daerah/Tahun	Jumlah penduduk miskin (juta jiwa)	Persentase penduduk miskin	Perubahan jumlah penduduk miskin (juta jiwa) (2024–2025)	Perubahan persentase penduduk miskin (2024–2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2024	11,64	7,09	-0,37	-0,36
Maret 2025	11,27	6,73		
Perdesaan				
Maret 2024	13,58	11,79	-1,00	-0,76
Maret 2025	12,58	11,03		
Perkotaan + Perdesaan				-0,33
Maret 2024	25,22	9,03	-1,37	-0,56
Maret 2025	23,85	8,47		

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 dan Maret 2025

Jika dibedakan menurut jenis kelamin, diperoleh nilai *Head Count Index* penduduk laki-laki pada Maret 2025 sebesar 8,38 persen (lihat Tabel 2.4). Hal ini berarti bahwa, dari seluruh penduduk laki-laki, 8,38 persen diantaranya berstatus miskin. Nilai ini mengalami penurunan sebanyak 0,48 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 8,86 persen. Penurunan *Head Count Index* juga terjadi pada kelompok penduduk perempuan yang turun sebesar 0,64 persen poin. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, nilai *Head Count Index* untuk penduduk yang berusia kurang dari 18 tahun pada Maret 2025 sebesar 11,00 persen dan mengalami penurunan 0,44 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 11,44 persen. Penurunan *Head Count Index* juga terjadi pada kelompok penduduk yang berusia lebih dari sama dengan 18 tahun yang turun sebesar 0,59 persen poin.

Tabel 2.4 Head Count Index Menurut Jenis Kelamin dan Umur Penduduk, Maret 2024 dan Maret 2025

Kategori	Maret 2024	Maret 2025
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	8,86	8,38
Perempuan	9,20	8,56
Umur		
< 18 tahun	11,44	11,00
≥ 18 tahun	8,05	7,46

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 dan Maret 2025

Disparitas Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi Cukup Tinggi

Dengan menggunakan standar garis kemiskinan tiap provinsi yang dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan, maka jumlah dan persentase penduduk miskin pada setiap provinsi menurut perkotaan dan perdesaan dapat dihitung. Tabel 2.5 di bawah ini menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi dan daerah pada kondisi Maret 2025. Pada tabel tersebut, terlihat bahwa tingkat kemiskinan terendah, terdapat di Provinsi Bali yakni sebesar 3,72 persen, sedangkan tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Papua Pegunungan yang mencapai 30,03 persen.

Tabel 2.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2025

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	174,18	530,51	704,69	8,54	14,44	12,33
Sumatera Utara	636,55	503,71	1.140,25	7,10	7,71	7,36
Sumatera Barat	119,45	192,90	312,35	3,91	6,93	5,35
Riau	173,52	287,45	460,96	5,75	6,43	6,16
Jambi	120,30	150,64	270,94	9,52	6,01	7,19
Sumatera Selatan	314,49	605,12	919,60	9,10	10,79	10,15
Bengkulu	87,39	165,58	252,97	12,34	11,95	12,08
Lampung	229,16	657,85	887,02	7,49	11,32	10,00
Bangka Belitung	35,68	42,03	77,71	3,89	6,59	5,00
Kepulauan Riau	101,34	15,94	117,28	4,13	8,33	4,44
DKI Jakarta	464,87	–	464,87	4,28	–	4,28
Jawa Barat	2.846,48	808,26	3.654,74	6,76	8,15	7,02
Jawa Tengah	1.746,72	1.619,97	3.366,69	9,10	9,92	9,48
DI Yogyakarta	321,04	104,77	425,82	10,16	10,46	10,23
Jawa Timur	1.641,18	2.234,70	3.875,88	7,00	12,86	9,50

Lanjutan Tabel 2.5

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banten	627,88	144,90	772,78	5,58	5,89	5,63
Bali	112,17	61,07	173,24	3,27	4,97	3,72
Nusa Tenggara Barat	353,68	300,89	654,57	12,02	11,51	11,78
Nusa Tenggara Timur	121,85	966,93	1.088,78	7,68	22,66	18,60
Kalimantan Barat	92,90	238,05	330,95	4,48	7,22	6,16
Kalimantan Tengah	69,13	78,67	147,80	5,46	4,97	5,19
Kalimantan Selatan	78,47	94,25	172,72	3,43	4,25	3,84
Kalimantan Timur	112,08	87,63	199,71	4,16	7,48	5,17
Kalimantan Utara	25,56	17,01	42,57	5,27	5,98	5,54
Sulawesi Utara	62,62	111,22	173,84	4,25	9,95	6,71
Sulawesi Tengah	76,92	279,27	356,19	6,98	12,93	10,92
Sulawesi Selatan	227,84	470,29	698,13	5,14	9,88	7,60
Sulawesi Tenggara	71,53	232,90	304,43	6,42	13,13	10,54
Gorontalo	27,01	135,73	162,74	4,68	20,80	13,24
Sulawesi Barat	24,71	127,60	152,31	8,35	10,94	10,41
Maluku	37,16	250,60	287,76	4,36	24,61	15,38
Maluku Utara	23,13	54,14	77,27	5,95	5,76	5,81
Papua Barat	14,94	91,95	106,90	9,22	25,88	20,66
Papua Barat Daya	29,40	74,17	103,57	8,98	29,71	17,95
Papua	35,63	135,75	171,38	6,58	38,47	19,16
Papua Selatan	8,16	97,37	105,53	4,12	28,86	19,71
Papua Tengah	14,19	288,11	302,31	5,51	36,54	28,90
Papua Pegunungan	10,51	326,81	337,32	13,00	31,36	30,03
INDONESIA	11.269,83	12.584,73	23.854,56	6,73	11,03	8,47

Catatan:

K = Perkotaan

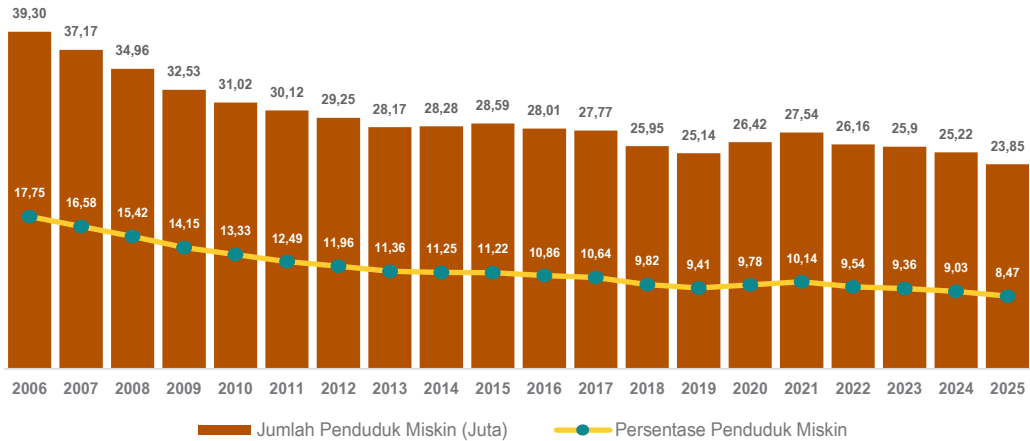
D = Perdesaan

K + D = Perkotaan + Perdesaan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Selama Periode 2006–2025, Tingkat Kemiskinan di Indonesia Mengalami Penurunan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2006–2025 dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Tabel 2.6 di bawah ini. Secara umum, pada periode tersebut tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada 2020 dan 2021. Jika dilihat menurut daerah, tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan selama periode tersebut mengalami penurunan baik secara jumlah maupun persentase. Penurunan persentase penduduk miskin di perdesaan relatif lebih cepat dibanding di perkotaan. Di perkotaan, pada tahun 2006, persentase penduduk miskin sebesar 13,47 persen dan pada tahun 2025 turun menjadi 6,73 persen. Sementara itu, di perdesaan, persentase penduduk miskin pada tahun 2006 sebesar 21,81 persen dan pada tahun 2025 turun menjadi 11,03 persen.



Catatan: - Tahun 2006,2007,2008,2009, dan 2010 Susenas Panel Modul Konsumsi (Maret)
- Tahun 2011-2025 Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran (Maret)
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2006–2025

Gambar 2.1 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 2006–2025

Tabel 2.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 2006–2025

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	K	D	K + D	K	D	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2006 ¹	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007 ¹	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008 ¹	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009 ¹	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010 ¹	11,10	19,93	31,03	9,87	16,56	13,33
2011 ²	11,08	19,04	30,12	9,23	15,72	12,49
2012 ²	10,71	18,54	29,25	8,79	15,10	11,96
2013 ²	10,39	17,78	28,17	8,42	14,28	11,36
2014 ²	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25
2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22
2016	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86
2017	10,67	17,10	27,77	7,72	13,93	10,64
2018	10,14	15,81	25,95	7,02	13,20	9,82
2019	9,99	15,15	25,14	6,69	12,85	9,41
2020	11,16	15,26	26,42	7,38	12,82	9,78
2021	12,17	15,37	27,54	7,89	13,10	10,14
2022	11,82	14,34	26,16	7,50	12,29	9,54
2023	11,74	14,16	25,90	7,29	12,22	9,36
2024	11,64	13,58	25,22	7,09	11,79	9,03
2025	11,27	12,58	23,85	6,73	11,03	8,47

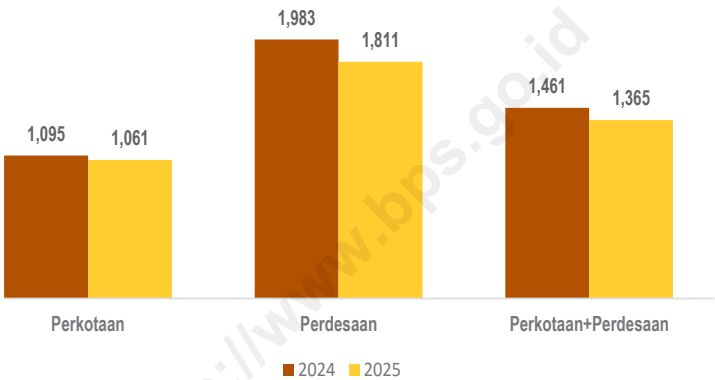
Catatan: ¹ Tahun 2006,2007,2008,2009, dan 2010 Susenas Panel Modul Konsumsi (Maret)
² Tahun 2011-2025 Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran (Maret)
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2006–2025

2.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di Perdesaan Lebih Tinggi dibandingkan di Perkotaan

Selain persentase penduduk miskin, indikator kemiskinan lain yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi dan pengambilan kebijakan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) merupakan nilai rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Pada tahun 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi di perkotaan maupun perdesaan. Jika dilihat lebih rinci, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih jauh dari garis kemiskinan dibandingkan di perkotaan.

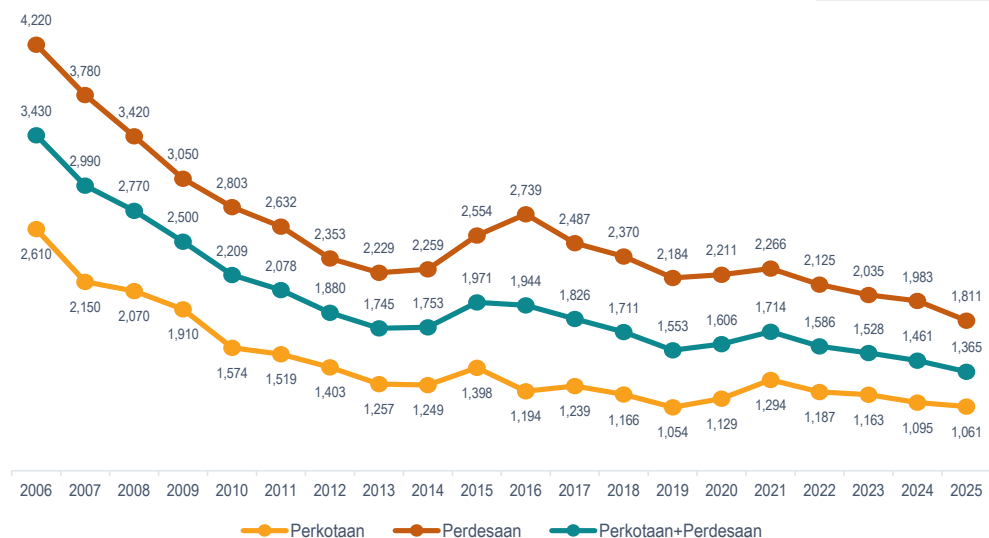


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 dan Maret 2025

Gambar 2.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2024 dan Maret 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Berfluktuasi Antarwaktu

Pada gambar 2.3 di bawah ini, terlihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) selama periode 2006–2025 berfluktuasi dan hampir memiliki pola yang sama baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sejak tahun 2006 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) menurun meski sempat meningkat pada tahun 2014, 2015, 2020, dan 2021. Seiring dengan pemulihan pasca Covid-19 yang melanda Indonesia, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) mulai mengalami penurunan sejak 2022 hingga saat ini.



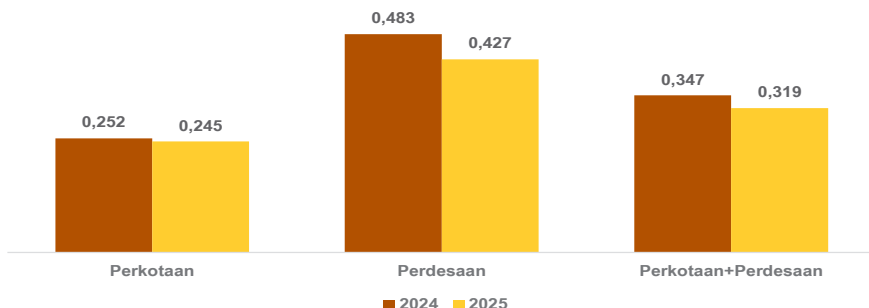
Catatan: - Tahun 2006,2007,2008,2009, dan 2010 Susenas Panel Modul Konsumsi (Maret)
 - Tahun 2011-2025 Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran (Maret)
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2006-2025

Gambar 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), 2006-2025

2.3 Indeks Keparahannya Kemiskinan

Pada Periode Maret 2024-Maret 2025, Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) Turun Sebesar 0,028 Poin

Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), indikator lain yang perlu dilihat adalah Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2). Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2). Gambar 2.4 menyajikan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) periode Maret 2024 dan Maret 2025. Jika dilihat menurut daerah, Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) baik di perkotaan maupun di perdesaan menurun. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) di perkotaan mengalami penurunan dari 0,252 menjadi 0,245, sedangkan di perdesaan turun dari 0,483 menjadi 0,427.

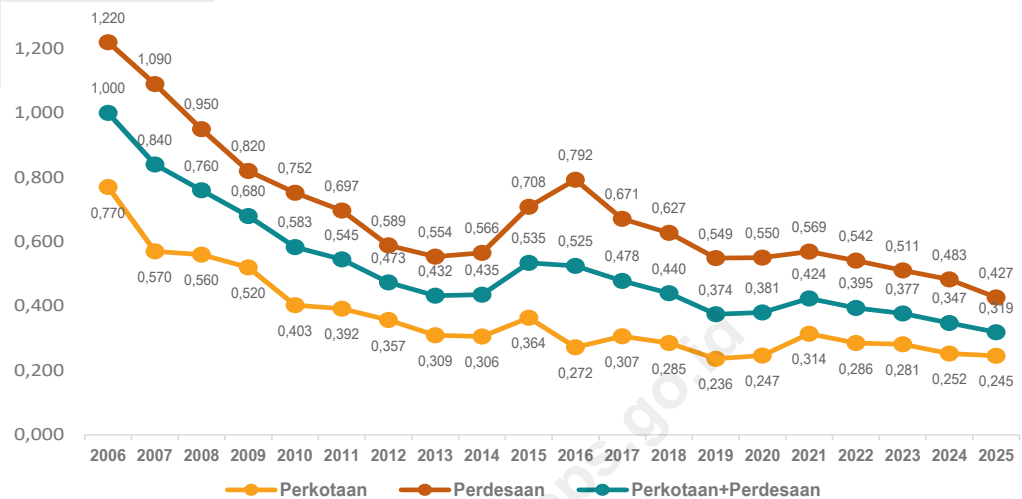


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 dan Maret 2025

Gambar 2.4 Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2024 dan Maret 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Berfluktuasi Antarwaktu

Pada periode 2006–2025, perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) berfluktuasi dan hampir memiliki pola yang sama baik di perkotaan maupun di pedesaan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) cenderung menurun meskipun mengalami beberapa kali kenaikan pada tahun 2014, 2015, 2020 dan 2021.



Catatan: - Tahun 2006,2007,2008,2009, dan 2010 Susenas Panel Modul Konsumsi (Maret)
- Tahun 2011–2025 Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran (Maret)
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2006–2025

Gambar 2.5 Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2), 2006–2025



BAB 3

Ketimpangan Pengeluaran di Indonesia

Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2025

GINI RATIO MARET 2025

0,375



Turun 0,004

dibanding Maret 2024

Bila gini ratio = 0, ketimpangan pengeluaran merata sempurna.

artinya setiap orang memiliki pengeluaran yang sama dengan yang lainnya

Bila gini ratio = 1, ketimpangan pengeluaran timpang sempurna.

artinya pengeluaran hanya dimiliki oleh satu orang atau satu kelompok saja dan yang lainnya tidak sama sekali



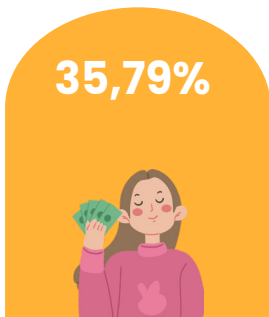
DISTRIBUSI PENGELUARAN PERKAPITA MENURUT KRITERIA BANK DUNIA, MARET 2025

18,65%



40 Persen Penduduk Terbawah

35,79%



40 Persen Penduduk Menengah

45,56%

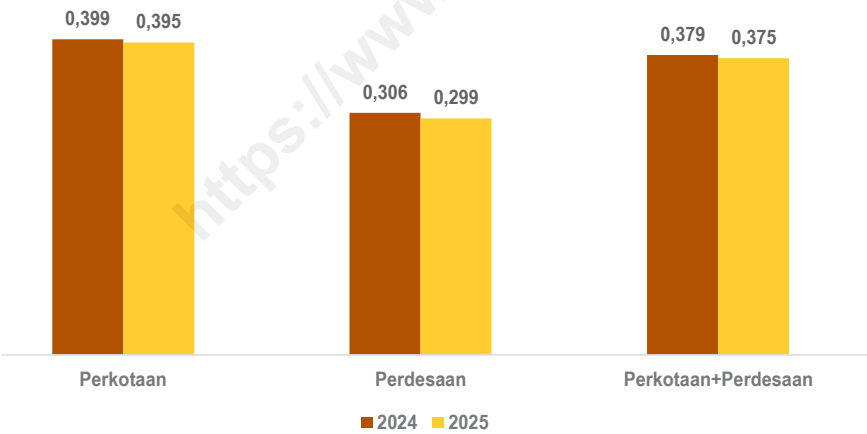


20 Persen Penduduk Teratas

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang penting untuk dilihat, karena merupakan ukuran kemiskinan relatif. Namun, karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Ukuran yang menggambarkan ketidakmerataan pendapatan antara lain adalah koefisien Gini (*gini ratio*), Indeks Theil, Indeks-L, dan Ukuran Bank Dunia.

3.1 *Gini Ratio*

Gini ratio merupakan ukuran tingkat ketimpangan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ukuran ini didasarkan pada sebuah kurva *Lorenz*, di mana kurva *Lorenz* merupakan kurva yang menunjukkan perbandingan frekuensi kumulatif penduduk dengan pengeluaran (dalam konteks Indonesia). Perubahan *gini ratio* merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Pada Maret 2025, angka *gini ratio* menurun dibandingkan kondisi Maret 2024 dari 0,379 menjadi 0,375 (Gambar 3.1). Kondisi serupa jika dilihat menurut daerah, dibandingkan dengan Maret 2024, *gini ratio* perkotaan dan perdesaan sama-sama mengalami penurunan. Perkotaan turun sebesar 0,004 poin dan perdesaan turun sebesar 0,007 poin.



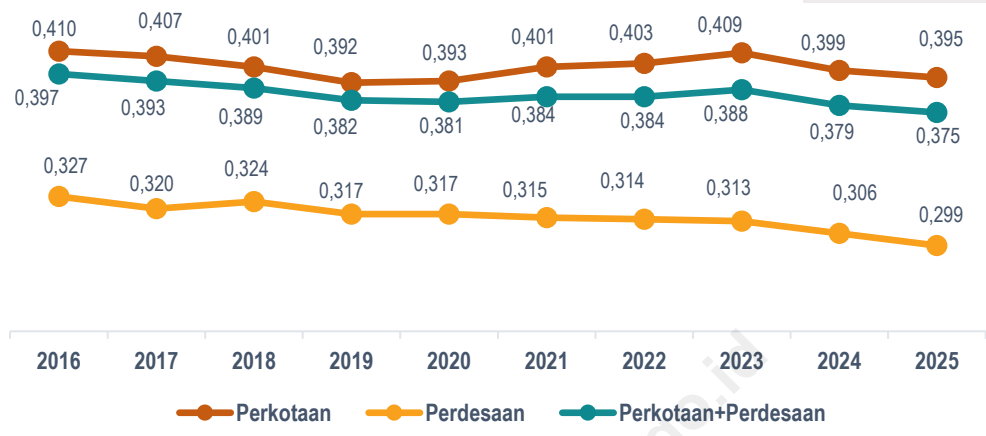
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 dan Maret 2025

Gambar 3.1 *Gini Ratio* di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2024 dan Maret 2025

Selama Periode 2016–2025, *Gini Ratio* Cenderung Mengalami Penurunan

Secara umum, sejak tahun 2016 sampai 2025 angka *gini ratio* mengalami penurunan yang cukup dalam. Meskipun pada periode 2021–2023 mengalami kenaikan, namun indikator ini kembali mengalami perbaikan sejak 2024 sampai sekarang. Angka *gini ratio* periode Maret 2025 merupakan nilai dengan capaian *gini ratio* terendah sepanjang periode tersebut.

Selain itu, tren kondisi nasional jika dilihat menurut daerah perkotaan dan perdesaan juga menunjukkan kondisi yang mirip. Sepanjang tahun 2015 sampai 2025 perkotaan telah turun sebesar 0,032 poin, sedangkan perdesaan telah turun sebesar 0,035 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut, telah terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Indonesia.



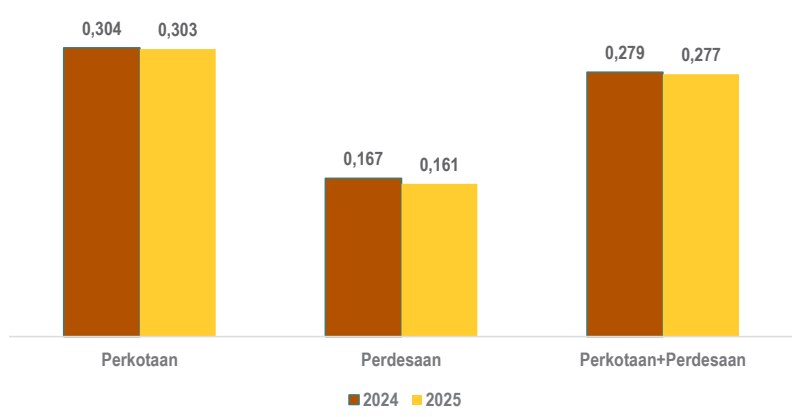
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016–2025 (kondisi Maret)

Gambar 3.2 Gini Ratio di Indonesia Menurut Daerah, 2016–2025

3.2 Indeks Theil

Secara Umum, Selama Periode Maret 2024–Maret 2025, Indeks Theil Turun

Indikator ini dikenal karena memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap perubahan pengeluaran pada kelompok penduduk atas (kaya). Selama periode Maret 2024 hingga Maret 2025, tercatat adanya tren perbaikan ketimpangan secara nasional, di mana Indeks Theil menunjukkan penurunan tipis dari 0,279 menjadi 0,277 (Gambar 3.3). Pola penurunan yang mencerminkan ketimpangan yang semakin rendah ini juga teramati konsisten baik di area perkotaan maupun perdesaan.



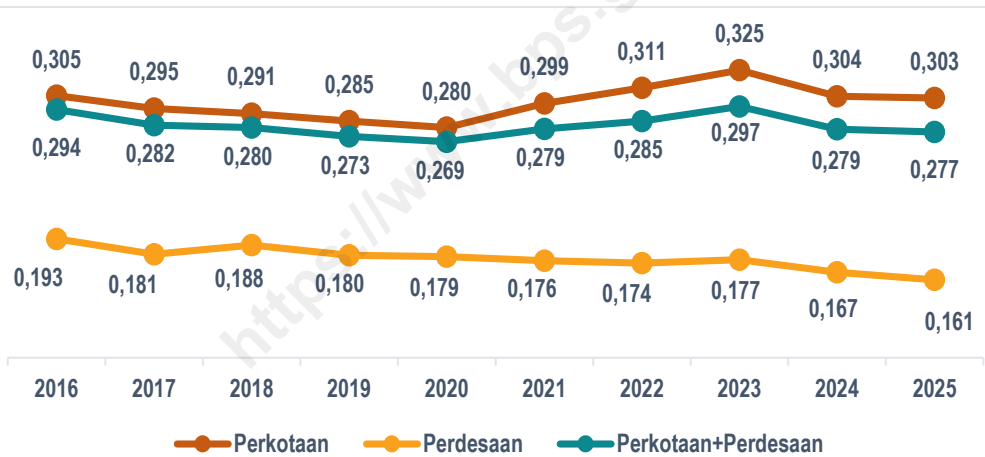
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 dan Maret 2025

Gambar 3.3 Indeks Theil di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2024 dan Maret 2025

Selama Periode 2016–2025, Indeks Theil Mengalami Perubahan dari Tahun ke Tahun

Secara jangka panjang, tren Indeks Theil nasional menunjukkan perbaikan signifikan dalam satu dekade terakhir. Dari tahun 2016 dengan nilai indeks yang relatif tinggi sebesar 0,294, ketimpangan terus membaik hingga mencapai 0,277 pada tahun 2025. Pola fluktuasi jangka panjang ini mirip dengan yang terjadi pada *Gini Ratio*, dengan sedikit peningkatan ketimpangan yang teramati antara tahun 2021–2023, sebelum akhirnya kembali menunjukkan penurunan sejak tahun 2024.

Meskipun tren nasional membaik, penting untuk dicatat bahwa terdapat disparitas yang cukup lebar antara ketimpangan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Pola fluktuasi Indeks Theil di perkotaan cenderung mereplikasi tren yang terjadi secara nasional, mengindikasikan bahwa ketimpangan di area urban memiliki pengaruh besar pada statistik nasional. Sementara itu, ketimpangan di daerah perdesaan secara historis berada pada level yang jauh lebih rendah, yang awalnya 0,193 hingga menjadi 0,161 selama periode 2016–2025. Angka yang lebih rendah di perdesaan ini menyiratkan bahwa distribusi pengeluaran di wilayah tersebut cenderung lebih merata dibandingkan dengan wilayah perkotaan.



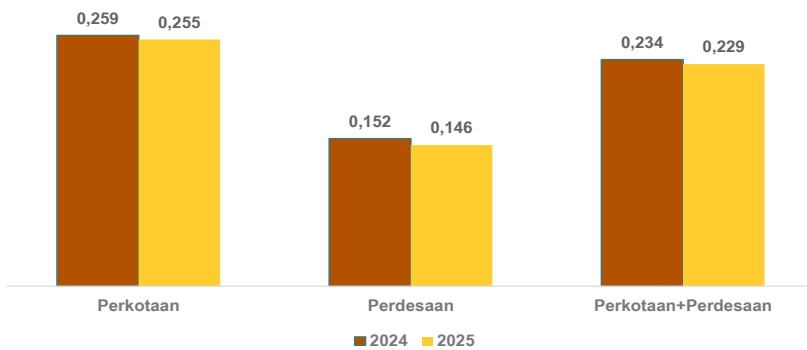
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016–2025 (kondisi Maret)

Gambar 3.4 Indeks Theil di Indonesia Menurut Daerah, 2016–2025

3.3 Indeks L

Secara Umum, Selama Periode Maret 2024–Maret 2025, Indeks-L Menurun

Selama periode Maret 2024 hingga Maret 2025, ketimpangan yang diukur oleh Indeks L menunjukkan perbaikan secara nasional, ditandai dengan penurunan dari 0,234 menjadi 0,229 (Gambar 3.5). Pola penurunan ini konsisten di seluruh wilayah, di mana baik Indeks L di perkotaan maupun perdesaan turut mencatatkan penurunan, mengindikasikan adanya perbaikan distribusi pengeluaran yang memihak kelompok rentan di kedua wilayah.

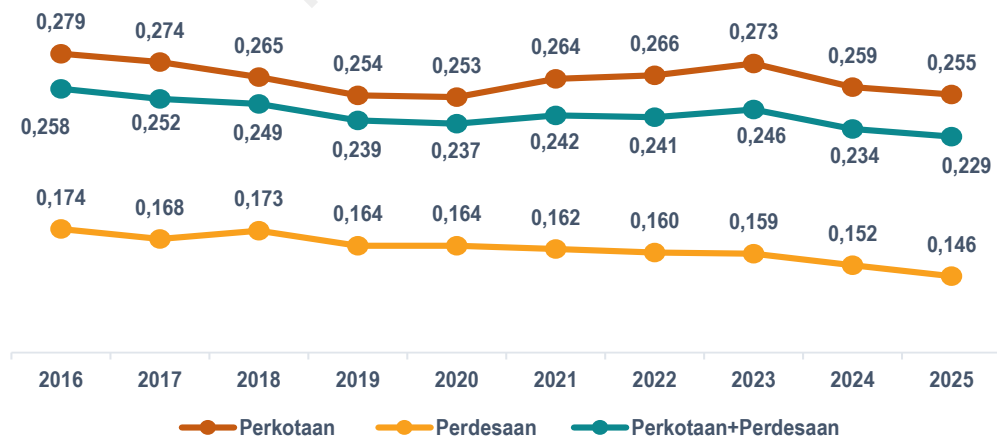


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 dan Maret 2025

Gambar 3.5 Indeks-L di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2024 dan Maret 2025

Selama Periode 2016–2025, Indeks-L Cenderung Mengalami Penurunan

Secara umum, dalam rentang waktu jangka panjang 2016 hingga 2025, Indeks L nasional menunjukkan tren penurunan yang positif, meskipun diselingi oleh kenaikan di beberapa tahun tertentu. Ketika dianalisis berdasarkan wilayah, pola di perkotaan menunjukkan dinamika yang spesifik: meskipun tren jangka panjangnya menurun, Indeks L perkotaan mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2021 hingga mencapai puncaknya di tahun 2023 sebesar 0,273, menunjukkan pelebaran ketimpangan yang memukul kelompok bawah. Namun, pada tahun 2024, terjadi koreksi yang menyebabkan Indeks L perkotaan menurun kembali menjadi 0,259. Pola ini kontras dengan kondisi di perdesaan. Sejak 2016 hingga 2025, Indeks L di perdesaan secara konsisten menunjukkan tren penurunan, yang berarti distribusi pengeluaran bagi kelompok bawah di perdesaan cenderung semakin membaik dan lebih merata, hanya diselingi oleh sedikit kenaikan pada tahun 2018 (Gambar 3.6).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016–2025 (kondisi Maret)

Gambar 3.6 Indeks-L di Indonesia Menurut Daerah, 2016–2025

3.4 Distribusi Pengeluaran

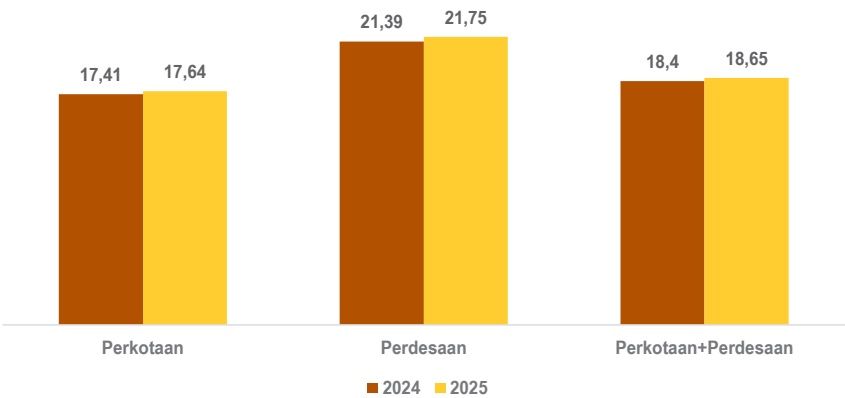
Analisis ini bertujuan mengukur dan mengamati perubahan tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran antarkelompok penduduk di Indonesia menggunakan Kriteria Bank Dunia. Metode ini membagi populasi menjadi tiga partisi: 40 persen terbawah (kelompok pengeluaran rendah), 40 persen menengah, dan 20 persen teratas (kelompok pengeluaran tinggi). Fokus utama dari kriteria ini adalah melihat porsi pengeluaran yang dikuasai oleh 40 persen penduduk terbawah sebagai tolok ukur pemerataan.

Tren Nasional: Peningkatan Pemerataan Pengeluaran

Secara nasional, data menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pengeluaran. Pada Maret 2024, porsi pengeluaran yang dinikmati oleh 40 persen penduduk terbawah adalah sebesar 18,40 persen. Setahun kemudian, tepatnya pada Maret 2025, persentase ini kembali menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 18,65 persen. Kenaikan sebesar 0,25 persen poin dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran rendah mendapatkan bagian yang lebih besar dari total pengeluaran nasional.

Ketika dianalisis berdasarkan wilayah, pola perbaikan ini terlihat jelas baik di perkotaan maupun perdesaan, meskipun terdapat perbedaan tingkat pemerataan antara keduanya. Di wilayah perkotaan, persentase pengeluaran 40 persen terbawah pada Maret 2024 adalah 17,41 persen. Angka ini kemudian meningkat menjadi 17,64 persen pada Maret 2025, mencatat kenaikan sebesar 0,23 persen poin.

Sementara itu, wilayah perdesaan secara konsisten menunjukkan tingkat pemerataan yang lebih baik dibandingkan perkotaan. Pada Maret 2024, porsi pengeluaran 40 persen terbawah di perdesaan sudah mencapai 21,39 persen. Angka ini mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan, yaitu sebesar 0,36 persen poin, sehingga pada Maret 2025 persentasenya mencapai 21,75 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 dan Maret 2025

Gambar 3.7 Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 Persen Terendah Menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, Maret 2024 dan Maret 2025

Tabel 3.1 Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, 2015–2025

Daerah/ Kelom- pok Penduduk	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Perkotaan											
40 % Terendah	15,83	15,91	16,04	16,47	16,93	16,94	16,81	17,07	16,99	17,41	17,64
40 % Menengah	34,60	36,74	36,89	36,93	37,09	36,94	36,03	35,01	34,42	34,87	34,98
20 % Teratas	49,57	47,35	47,07	46,60	45,98	46,13	47,16	47,93	48,59	47,72	47,38
Perdesaan											
40 % Terendah	20,42	20,40	20,36	20,15	20,59	20,62	20,68	21,01	21,18	21,39	21,75
40 % Menengah	37,53	38,50	39,65	39,59	39,67	39,61	39,58	38,91	38,61	39,17	39,52
20 % Teratas	42,05	41,10	39,99	40,26	39,74	39,77	39,74	40,08	40,21	39,44	38,74
Perkotaan + Perdesaan											
40 % Terendah	17,10	17,02	17,12	17,29	17,71	17,73	17,76	18,06	18,04	18,40	18,65
40 % Menengah	34,65	36,09	36,47	36,62	36,81	36,78	36,37	35,74	35,25	35,69	35,79
20 % Teratas	48,25	46,89	46,41	46,09	45,48	45,49	45,87	46,20	46,71	45,91	45,56

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi Pengeluaran Tahun 2015–2025 (kondisi Maret)

Secara Umum, Selama Periode 2024–2025, Rasio (Q_5/Q_1) Menurun

Rasio pengeluaran antara Kelompok 20 Persen Teratas (Q_5) dan Kelompok 20 Persen Terendah (Q_1) berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur distribusi pengeluaran secara umum antarkelompok penduduk. Secara prinsip, semakin besar nilai rasio (Q_5/Q_1) ini, semakin tinggi tingkat ketimpangan pengeluaran yang terjadi di suatu populasi.

Analisis pada periode 2024 hingga 2025 menunjukkan adanya tren positif yang signifikan di tingkat nasional. Rasio (Q_5/Q_1) secara umum tercatat menurun dari 6,22 pada tahun 2024 menjadi 6,08 pada tahun 2025. Penurunan ini memiliki implikasi langsung bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran semakin rendah (atau pemerataan semakin baik), karena selisih pengeluaran antara kelompok terkaya (Q_5) dan termiskin (Q_1) telah mengecil.

Peningkatan pemerataan ini tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga tersebar merata menurut daerah. Data menunjukkan bahwa rasio (Q_5/Q_1) mengalami penurunan baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan.

Tabel 3.2 Persentase Pembagian Pengeluaran Menurut Kelas Kuintil dan Daerah, 2024 dan 2025

Kuintil	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Q ₁	6,94	7,04	8,66	8,86	7,38	7,50
Q ₂	10,46	10,60	12,72	12,88	11,02	11,15
Q ₃	14,36	14,48	16,71	16,89	14,91	15,05
Q ₄	20,51	20,50	22,45	22,62	20,79	20,75
Q ₅	47,73	47,38	39,44	38,74	45,90	45,56
Rasio Q ₅ /Q ₁	6,87	6,73	4,55	4,37	6,22	6,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 dan Maret 2025

BAB 4

Profil Rumah Tangga Miskin di Indonesia

Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2025

SOSIAL DEMOGRAFI

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin adalah **4-5 orang**



KETENAGAKERJAAN

Terdapat **45,67 persen** Rumah Tangga Miskin dengan Kepala Rumah Tangga yang Bekerja di Sektor Pertanian



PENDIDIKAN

Sebagian Besar Kepala Rumah Tangga Miskin Berpendidikan Rendah (Tidak Tamat SD/Sederajat atau Tamat SD/Sederajat) yakni sebesar **62,72 persen**



TEMPAT TINGGAL

Persentase Rumah Tangga Miskin yang Tinggal di Rumah dengan Luas Lantai per Kapita <7,2 m² sebesar **16,00 persen**



4.1 Karakteristik Sosial Demografi

Karakteristik sosial demografi yang menggambarkan profil rumah tangga miskin mencakup beberapa aspek utama, antara lain rata-rata jumlah anggota rumah tangga, proporsi kepala rumah tangga perempuan, rata-rata usia kepala rumah tangga, serta tingkat pendidikan yang diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah. Setiap aspek tersebut dianalisis dengan membandingkan rumah tangga miskin dan tidak miskin. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola serta kesenjangan sosial demografis antarkelompok, sehingga memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin.

Tabel 4.1 Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin menurut Daerah, 2025

Karakteristik Rumah Tangga/Daerah	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
1. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga:		
Perkotaan (K)	4,77	3,76
Perdesaan (D)	4,68	3,68
Perkotaan + Perdesaan (K + D)	4,72	3,73
2. Persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga:		
Perkotaan (K)	10,10	12,44
Perdesaan (D)	10,83	11,32
Perkotaan + Perdesaan (K + D)	10,49	11,99
3. Rata-rata umur kepala rumah tangga (tahun):		
Perkotaan (K)	50,06	49,84
Perdesaan (D)	50,71	50,57
Perkotaan + Perdesaan (K + D)	50,40	50,13
4. Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga (tahun):		
Perkotaan (K)	7,47	10,03
Perdesaan (D)	6,08	7,53
Perkotaan + Perdesaan (K + D)	6,73	9,03

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Rumah Tangga Miskin: Anggota Rumah Tangga Lebih Banyak, Rata-Rata Umur Kepala Rumah Tangga Lebih Tua dan Rata-Rata Lama Sekolah Kepala Rumah Tangga Lebih Rendah Dibanding Rumah Tangga Tidak Miskin

Rumah tangga miskin umumnya memiliki jumlah anggota rumah tangga yang lebih besar. Dalam hal distribusi usia, kepala rumah tangga miskin rata-rata berusia 50,40 tahun, sedikit lebih tinggi daripada kepala rumah tangga yang tidak miskin, yang berusia rata-rata 50,13 tahun. Selain itu, tingkat pendidikan kepala rumah tangga

miskin, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah, juga menunjukkan disparitas signifikan, yaitu 6,73 tahun, dibandingkan dengan 9,03 tahun pada kepala rumah tangga yang tidak miskin. Disparitas dalam jumlah anggota rumah tangga dan tingkat pendidikan ini dapat berimplikasi pada keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, yang berpotensi memperburuk kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin serta membatasi kapasitas mereka untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Laki-laki sebagai Kepala Rumah Tangga Banyak Ditemui di Rumah Tangga Miskin

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan lebih dominan pada kelompok rumah tangga tidak miskin dibandingkan dengan rumah tangga miskin. Hal ini diperkuat oleh data dalam Tabel 4.2, di mana nilai *Head Count Index* (HCI) untuk rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan tercatat sebesar 6,01 persen. Dengan kata lain, 6,01 persen dari seluruh rumah tangga berstatus kepala rumah tangga perempuan tergolong sebagai rumah tangga miskin. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan *Head Count Index* untuk rumah tangga dengan kepala laki-laki, yaitu sebesar 6,92 persen. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan cenderung lebih sedikit mengalami kemiskinan dibandingkan rumah tangga dengan kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.2 *Head Count Index* Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2025

Jenis Kelamin	<i>Head Count Index</i>		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	5,52	8,94	6,92
Perempuan	4,41	8,54	6,01

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

4.2 Karakteristik Pendidikan

Tingkat Buta Huruf Kepala Rumah Tangga Miskin Lebih Tinggi Dibanding Rumah Tangga Tidak Miskin

Pendidikan memiliki peran signifikan dalam menentukan status kemiskinan. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang yang lebih rendah untuk jatuh ke dalam kemiskinan, karena pendidikan membuka akses terhadap kesempatan kerja yang lebih baik. Berdasarkan data, kepala rumah tangga yang tergolong buta huruf (tidak mampu membaca dan menulis dalam huruf Latin atau huruf lainnya) di rumah tangga miskin mencapai 7,72 persen, lebih tinggi daripada persentase kepala rumah tangga buta huruf di rumah tangga tidak miskin, yang sebesar 2,92 persen (Tabel 4.3). Selain itu, *Head Count Index* (HCI) untuk rumah tangga dengan kepala rumah tangga buta huruf mencapai 16,18 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan HCI rumah tangga yang kepala rumah tangganya memiliki kemampuan membaca dan menulis. Data ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi merupakan faktor yang memperbesar kerentanan terhadap kemiskinan, karena keterbatasan literasi menghalangi akses ke pekerjaan yang stabil dan berpendapatan layak, yang pada akhirnya menghambat kemampuan rumah tangga tersebut untuk keluar dari kemiskinan (Nadeem T., et al, 2021).

Tabel 4.3 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga dan Daerah, 2025

Kemampuan Membaca dan Menulis	Rumah Tangga Miskin			Rumah Tangga Tidak Miskin			Head Count Index (HCI)		
	K	D	K + D	K	D	K + D	K	D	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Huruf Latin	39,79	48,88	44,63	38,80	44,11	40,92	5,51	9,76	7,39
Huruf Lainnya	0,60	0,76	0,68	0,22	0,53	0,35	13,21	12,26	12,63
Huruf Latin dan Lainnya	55,23	39,71	46,97	59,33	50,51	55,81	5,03	7,13	5,80
Tidak Dapat Membaca dan Menulis	4,39	10,65	7,72	1,64	4,86	2,92	13,18	17,64	16,18

Catatan:
K = Perkotaan D = Perdesaan K + D = Perkotaan + Perdesaan
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Miskin Lebih Rendah Dibanding Rumah Tangga Tidak Miskin

Berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang dicapai, persentase kepala rumah tangga miskin dengan pendidikan rendah (tidak tamat SD atau setara dengan SD) lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin (Tabel 4.4). Temuan ini konsisten dengan data pada Tabel 4.1 yang menunjukkan bahwa kepala rumah tangga miskin umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan kepala rumah tangga tidak miskin. Pola ini serupa di wilayah perkotaan maupun perdesaan, menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan merupakan isu umum yang mempengaruhi kemiskinan di berbagai wilayah.

Selain itu, Tabel 4.4 mengungkapkan bahwa *Head Count Index* untuk rumah tangga yang kepala rumah tangganya berpendidikan SD ke bawah lebih tinggi dibandingkan HCI pada rumah tangga yang kepala rumah tangganya berpendidikan SMP atau lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga miskin lebih banyak ditemukan di antara kelompok dengan pendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga dapat menghambat peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan memadai, sehingga memperkuat keterkaitan antara rendahnya pendidikan dan risiko kemiskinan dalam jangka panjang.

Tabel 4.4 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga dan Daerah, 2025

Pendidikan	Rumah Tangga Miskin			Rumah Tangga Tidak Miskin			Head Count Index (HCI)		
	K	D	K + D	K	D	K + D	K	D	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak Tamat SD ¹	18,79	29,96	24,74	9,13	19,57	13,29	10,48	13,00	11,98
SD Sederajat	35,50	40,16	37,98	22,12	36,53	27,86	8,36	9,69	9,06
SMP Sederajat	20,84	16,25	18,40	16,58	18,65	17,40	6,67	7,84	7,18
SMA Sederajat	22,87	12,03	17,10	36,95	20,33	30,32	3,40	5,46	3,96
Perguruan Tinggi	1,99	1,59	1,78	15,23	4,92	11,12	0,74	3,06	1,16

Catatan:
¹ termasuk kepala rumah tangga yang tidak/belum pernah bersekolah
 K = Perkotaan D = Perdesaan K + D = Perkotaan + Perdesaan
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

4.3 Karakteristik Ketenagakerjaan

Sumber penghasilan utama berperan penting sebagai indikator tingkat kesejahteraan, karena hal ini diharapkan mampu mencerminkan kondisi sosial ekonomi

suatu rumah tangga secara keseluruhan. Karakteristik ketenagakerjaan, seperti sektor usaha atau sumber penghasilan utama serta status pekerjaan, dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin. Rumah tangga miskin cenderung memiliki sumber penghasilan dari sektor yang kurang stabil atau berpenghasilan rendah, serta status pekerjaan yang tidak tetap atau rentan, yang secara langsung memengaruhi kemampuan mereka untuk meningkatkan kondisi ekonomi.

Sebagian Besar Rumah Tangga Miskin Menggantungkan Hidupnya Pada Sektor Pertanian

Secara umum, rumah tangga miskin cenderung bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama, dengan persentase mencapai 45,67 persen. Sebaliknya, mayoritas rumah tangga tidak miskin memperoleh penghasilan utama dari sektor jasa, yakni sebesar 38,83 persen (lihat Tabel 4.5).

Berdasarkan *Head Count Index* (HCI), rumah tangga dengan penghasilan utama dari sektor pertanian memiliki HCI tertinggi, yaitu 10,22 persen, yang menunjukkan tingginya prevalensi kemiskinan di sektor ini.

Diikuti oleh rumah tangga di mana kepala rumah tangganya bekerja di sektor industri, dengan HCI sebesar 6,48 persen. Sementara itu, HCI untuk rumah tangga yang kepala rumah tangganya tidak bekerja tercatat 6,32 persen, dan yang bekerja di sektor jasa sebesar 4,40 persen. Data ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian, meskipun menjadi tumpuan bagi banyak rumah tangga miskin, memiliki risiko kemiskinan yang lebih tinggi. Hal ini menyoroti pentingnya intervensi ekonomi dalam sektor pertanian serta diversifikasi ekonomi di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Tabel 4.5 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Sumber Penghasilan Utama Kepala Rumah Tangga dan Daerah, 2025

Sumber Penghasilan Utama	Rumah Tangga Miskin			Rumah Tangga Tidak Miskin			Head Count Index (HCI)		
	K	D	K + D	K	D	K + D	K	D	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak Bekerja	12,22	9,09	10,56	14,24	7,21	11,44	4,65	10,97	6,32
Pertanian	25,90	63,04	45,67	13,42	53,29	29,32	9,89	10,35	10,22
Industri ¹	26,09	13,42	19,35	23,14	16,29	20,41	6,03	7,44	6,48
Jasa	35,79	14,44	24,42	49,20	23,21	38,83	3,97	5,73	4,40

Catatan:
¹Sektor industri mencakup pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi
 K = Perkotaan D = Perdesaan K + D = Perkotaan + Perdesaan
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Pada Umumnya Kepala Rumah Tangga Miskin Bekerja di Sektor Informal

Pekerja dapat diklasifikasikan berdasarkan sektor kerja formal dan informal. Pekerja informal mencakup individu yang bekerja secara mandiri, bekerja dengan bantuan buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, pekerja lepas di sektor pertanian maupun non-pertanian, serta pekerja keluarga atau tidak dibayar.

Pada Tabel 4.6 dapat diketahui kelompok rumah tangga miskin, sebagian besar kepala rumah tangga bekerja di sektor informal yaitu sebesar 62,29 persen. Sebaliknya, kepala rumah tangga tidak miskin umumnya bekerja di sektor formal yaitu sebesar 40,52 persen.

Berdasarkan data dalam Tabel 4.6, dapat dilihat bahwa nilai *Head Count Index* (HCI) untuk rumah tangga yang kepala rumah tangganya adalah pekerja bebas berada pada angka tertinggi, yaitu 10,83 persen. Selanjutnya, rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga atau tidak dibayar sebesar 8,56 persen. Tingginya HCI pada kelompok pekerja informal mencerminkan kerentanan ekonomi yang tinggi akibat ketidakstabilan pendapatan, keterbatasan jaminan sosial, dan peluang kerja yang terbatas.

Tabel 4.6 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga dan Daerah, 2025

Status Pekerjaan	Rumah Tangga Miskin			Rumah Tangga Tidak Miskin			<i>Head Count Index</i> (HCI)		
	K	D	K + D	K	D	K + D	K	D	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak Bekerja	12,22	9,09	10,56	14,24	7,21	11,44	4,65	10,97	6,32
1 & 2	33,09	57,85	46,27	30,13	50,27	38,16	5,88	10,10	8,14
3	1,45	1,48	1,46	3,71	4,53	4,04	2,17	3,09	2,58
4	34,53	17,92	25,69	43,54	25,85	36,48	4,32	6,34	4,90
5	17,32	12,38	14,69	7,47	10,93	8,85	11,66	9,95	10,83
6	1,38	1,28	1,33	0,92	1,21	1,04	7,88	9,31	8,56

Catatan:

1. Berusaha sendiri
 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar
 3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
 4. Buruh/karyawan/pegawai
 5. Pekerja bebas
 6. Pekerja keluarga atau tidak dibayar
- K = Perkotaan D = Perdesaan K + D = Perkotaan + Perdesaan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

4.4 Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)

Indikator perumahan dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga antara lain luas dan jenis lantai, atap, dinding, penerangan, sumber air, jamban, dan status kepemilikan rumah tempat tinggal.

4.4.1 Luas Lantai

Tujuan 11 dalam SDGs berfokus pada menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan ini adalah 11.1.1(a), yang menilai akses rumah tangga terhadap rumah layak huni, termasuk kecukupan luas tempat tinggal. Menurut Bappenas (2020), kecukupan luas tempat tinggal didefinisikan sebagai luas lantai per kapita minimal 7,2 m².

Sebanyak 16,00 Persen Rumah Tangga Miskin Menempati Luas Lantai Per Kapita <7,2 m²

Data dalam Tabel 4.7 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga miskin yang tinggal di tempat dengan luas lantai per kapita di bawah standar (kurang dari 7,2 m²) mencapai 16,00 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin, yang hanya sebesar 4,56 persen. Selain itu, *Head Count Index* (HCI) untuk rumah tangga dengan luas lantai per kapita di bawah 7,2 m² tercatat sebesar 20,43 persen, mengindikasikan tingginya konsentrasi kemiskinan di rumah tangga dengan keterbatasan ruang hunian. Pola ini konsisten di wilayah perkotaan dan perdesaan, menunjukkan bahwa kecukupan ruang tempat tinggal tetap menjadi tantangan signifikan, khususnya bagi rumah tangga miskin.

Tabel 4.7 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Luas Lantai per Kapita (m²), 2025

Luas Lantai (m²)	Rumah Tangga Miskin			Rumah Tangga Tidak Miskin			Head Count Index (HCI)		
	K	D	K + D	K	D	K + D	K	D	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<7,2	17,85	14,38	16,00	5,60	2,98	4,56	15,34	31,99	20,43
≥7,2	82,15	85,62	84,00	94,40	97,02	95,44	4,72	7,93	6,05

Catatan: K = Perkotaan D = Perdesaan K + D = Perkotaan + Perdesaan
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

4.4.2 Jenis Lantai

Sebanyak 4,98 Persen Rumah Tangga Miskin Memiliki Rumah dengan Jenis Lantai Terluas adalah Tanah

Tabel 4.8 menunjukkan karakteristik rumah berdasarkan jenis lantai terbesar yang digunakan. Persentase rumah tangga miskin dengan lantai bambu/tanah tercatat sebesar 4,98 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin yang hanya sebesar 1,44 persen. Tren ini terlihat konsisten baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, yang menunjukkan bahwa lantai bambu/tanah masih banyak ditemui pada rumah tangga miskin.

Selain itu, *Head Count Index* (HCI) untuk rumah tangga dengan jenis lantai bambu/tanah mencapai 20,15 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang memiliki lantai bukan bambu/tanah, yaitu sebesar 6,58 persen. Data ini mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin cenderung lebih sering tinggal di tempat dengan lantai tanah, yang dapat berfungsi sebagai indikator keterbatasan akses terhadap hunian layak. Kondisi lantai yang tidak memadai dapat mengindikasikan kekurangan dalam kualitas lingkungan tempat tinggal dan mungkin berimplikasi pada kesehatan dan kesejahteraan penghuni, sehingga peningkatan standar perumahan menjadi aspek penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Tabel 4.8 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Jenis Lantai Terluas, 2025

Jenis Lantai	Rumah Tangga Miskin			Rumah Tangga Tidak Miskin			Head Count Index (HCI)		
	K	D	K + D	K	D	K + D	K	D	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bukan Tanah	97,01	93,28	95,02	99,45	97,22	98,56	5,26	8,56	6,58
Tanah	2,99	6,72	4,98	0,55	2,78	1,44	23,48	19,10	20,15

Catatan:

K = Perkotaan

D = Perdesaan

K + D = Perkotaan + Perdesaan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

4.4.3 Jenis Atap

Head Count Index Tertinggi Terdapat pada Rumah Tangga dengan Jenis Atap Terluas adalah Ijuk/Rumbia

Baik rumah tangga miskin maupun tidak miskin, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, sebagian besar telah menggunakan atap dari bahan beton/genteng/sirap atau seng/asbes. Oleh karena itu, jenis atap ini kurang sensitif dalam membedakan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin. Hal ini juga tercermin dalam *Head Count Index* (HCI), di mana rumah tangga dengan atap beton/genteng/

sirap dan seng/asbes masing-masing memiliki HCI sebesar 6,61 persen dan 6,89 persen.

Namun, nilai HCI tertinggi terdapat pada rumah tangga yang menggunakan atap ijuk atau rumbia, yaitu sebesar 23,40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga miskin lebih sering ditemukan di rumah dengan jenis atap ijuk/rumbia, yang dapat menjadi penanda keterbatasan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa bahan atap yang lebih tradisional dapat digunakan sebagai salah satu indikator tambahan dalam identifikasi kelompok rumah tangga miskin.

Tabel 4.9 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Jenis Atap Terluas, 2025

Jenis Atap Terluas	Rumah Tangga Miskin			Rumah Tangga Tidak Miskin			Head Count Index (HCI)		
	K	D	K + D	K	D	K + D	K	D	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Beton/Genteng/Sirap	62,55	48,72	55,19	60,42	51,79	56,98	5,56	8,41	6,61
Seng/Asbes	37,20	48,07	42,99	39,35	47,17	42,47	5,10	9,05	6,89
Ijuk/Rumbia	0,13	3,12	1,73	0,05	0,96	0,41	13,27	24,10	23,40
Lainnya	0,11	0,09	0,10	0,18	0,08	0,14	3,54	9,50	4,99

Catatan:
K = Perkotaan D = Perdesaan K + D = Perkotaan + Perdesaan
Sumber : Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

4.4.4 Jenis Dinding

Persentase Rumah Tangga Miskin dengan Jenis Dinding Tembok Lebih Rendah Dibanding Rumah Tangga Tidak Miskin

Jenis dinding rumah menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin. Persentase rumah tangga tidak miskin yang memiliki dinding berbahan tembok mencapai 83,52 persen, lebih tinggi dibandingkan rumah tangga miskin yang sebesar 68,03 persen. Tren ini berlaku baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di sisi lain, rumah tangga miskin menggunakan dinding dari bahan kayu, bambu, atau bahan lainnya lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.10.

Nilai Head Count Index (HCI) juga mencerminkan kondisi ini, di mana rumah tangga dengan dinding berbahan bambu atau bahan lain memiliki HCI yang lebih tinggi daripada rumah tangga dengan dinding tembok atau kayu. Pola ini konsisten baik di perkotaan maupun di perdesaan, yang mengindikasikan bahwa bahan dinding rumah berperan sebagai indikator kualitas hunian. Dinding dari bahan bambu atau material lainnya sering kali merupakan pilihan yang lebih murah, namun kurang tahan lama dan

kurang melindungi dari kondisi cuaca ekstrem. Hal ini menunjukkan keterbatasan finansial rumah tangga miskin dalam mengakses bahan bangunan yang lebih kokoh dan berkualitas. Oleh karena itu, penggunaan bahan dinding rumah dapat dijadikan salah satu indikator dalam mengidentifikasi kelompok rumah tangga miskin dan memahami kebutuhan peningkatan kualitas tempat tinggal mereka.

Tabel 4.10 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Jenis Dinding Terluas, 2025

Jenis Dinding Terluas	Rumah Tangga Miskin			Rumah Tangga Tidak Miskin			Head Count Index (HCI)		
	K	D	K + D	K	D	K + D	K	D	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tembok	79,68	57,79	68,03	91,34	71,74	83,52	4,73	7,29	5,62
Kayu	15,24	35,93	26,25	7,23	24,33	14,05	10,71	12,60	12,02
Bambu	4,37	4,91	4,66	1,24	3,36	2,08	16,73	12,49	14,05
Lainnya	0,70	1,37	1,06	0,20	0,57	0,35	16,67	18,92	18,16

Catatan:
 K = Perkotaan D = Perdesaan K + D = Perkotaan + Perdesaan
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

4.4.5 Jenis Penerangan

Penggunaan Listrik PLN di Rumah Tangga Miskin Lebih Rendah Dibanding Di Rumah Tangga Tidak Miskin

Penggunaan listrik dari PLN lebih dominan dibandingkan listrik non-PLN atau sumber penerangan lain, baik di kalangan rumah tangga miskin maupun tidak miskin, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.11. Namun, persentase penggunaan listrik PLN lebih tinggi pada rumah tangga tidak miskin, yaitu sebesar 98,68 persen, dibandingkan rumah tangga miskin yang mencapai 95,47 persen

Nilai *Head Count Index* (HCI) memperlihatkan bahwa rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan non-PLN atau bukan listrik memiliki nilai HCI yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang menggunakan listrik PLN. Pola ini konsisten di wilayah perkotaan maupun perdesaan, menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap listrik PLN lebih sering dialami oleh rumah tangga miskin. Kondisi ini dapat mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses infrastruktur dasar, seperti listrik, yang berkontribusi pada kesenjangan kualitas hidup antara kelompok miskin dan tidak miskin. Akses yang terbatas ini bukan hanya memengaruhi aspek kenyamanan, tetapi juga potensi peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan, mengingat listrik memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan di rumah tangga.

Tabel 4.11 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Sumber Penerangan Rumah, 2025

Sumber Penerangan Rumah	Rumah Tangga Miskin			Rumah Tangga Tidak Miskin			Head Count Index (HCI)		
	K	D	K + D	K	D	K + D	K	D	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Listrik PLN	99,59	91,84	95,47	99,79	97,00	98,68	5,37	8,46	6,61
Listrik Non PLN	0,34	4,60	2,61	0,19	2,18	0,98	9,17	17,08	16,23
Bukan Listrik	0,07	3,55	1,92	0,02	0,82	0,34	18,67	29,75	29,45

Catatan:
K = Perkotaan D = Perdesaan K + D = Perkotaan + Perdesaan
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

4.4.6 Sumber Air

Persentase Rumah Tangga Miskin yang Memiliki Akses terhadap Air Layak Lebih Rendah Dibandingkan Rumah Tangga Tidak Miskin

Akses terhadap air minum layak merupakan salah satu indikator penting dalam SDGs, khususnya pada Indikator 6.1.1* yang mengukur persentase rumah tangga dengan akses terhadap layanan air minum yang dikelola secara aman. Sejak 2019, standar ini mengikuti pedoman SDGs, yang mendefinisikan akses air minum layak sebagai penggunaan sumber air utama seperti ledeng, air terlindungi, atau air hujan. Sumber air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Rumah tangga yang menggunakan air kemasan juga dianggap memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk keperluan mandi dan cuci berasal dari sumber yang memenuhi kriteria tersebut.

Data menunjukkan bahwa persentase rumah tangga tidak miskin dengan akses terhadap air layak sebagai sumber air minum mencapai 93,54 persen, lebih tinggi dibandingkan rumah tangga miskin yang hanya 88,72 persen. Sebaliknya, persentase rumah tangga miskin yang tidak memiliki akses air layak sebesar 11,28 persen, juga lebih tinggi daripada rumah tangga tidak miskin yang hanya 6,46 persen, dengan pola serupa baik di perkotaan maupun di perdesaan (lihat Tabel 4.12).

Nilai *Head Count Index* (HCI) mencerminkan ketimpangan akses ini, di mana HCI untuk rumah tangga yang tidak memiliki akses air layak sebesar 11,33 persen, lebih tinggi dibandingkan rumah tangga dengan akses air layak sebesar 6,48 persen. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap air minum layak masih menjadi isu signifikan bagi rumah tangga miskin. Ketiadaan air layak minum tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berpotensi menambah beban ekonomi dan waktu bagi rumah tangga miskin, karena mereka mungkin perlu mengeluarkan biaya tambahan atau menempuh jarak lebih jauh untuk memperoleh air bersih.

Tabel 4.12 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Akses Sumber Air Minum Layak Rumah Tangga, 2025

Sumber Air Minum Layak	Rumah Tangga Miskin			Rumah Tangga Tidak Miskin			Head Count Index (HCI)		
	K	D	K + D	K	D	K + D	K	D	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak Ada Akses	6,08	15,85	11,28	2,81	11,96	6,46	10,96	11,46	11,33
Ada akses	93,92	84,15	88,72	97,19	88,04	93,54	5,21	8,53	6,48

Catatan:

K = Perkotaan D = Perdesaan K + D = Perkotaan + Perdesaan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

4.4.7 Jenis Jamban

Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri Lebih Rendah Dibandingkan Rumah Tangga Tidak Miskin

Ketersediaan jamban menjadi indikator penting dalam menilai kelayakan suatu hunian sebagai rumah sehat dan lebih spesifik terhadap tingkat sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga tersebut. Fasilitas jamban dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu jamban pribadi, jamban bersama atau komunal, dan jamban umum atau tidak ada fasilitas jamban. Persentase rumah tangga tidak miskin yang memiliki jamban pribadi tercatat sebesar 90,99 persen, lebih tinggi dibandingkan rumah tangga miskin yang sebesar 81,72 persen.

Nilai *Head Count Index* (HCI) untuk rumah tangga yang tidak memiliki jamban atau menggunakan jamban umum tercatat sebesar 16,26 persen, lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang memiliki jamban pribadi dengan HCI sebesar 6,16 persen atau rumah tangga yang menggunakan jamban komunal dengan HCI sebesar 9,53 persen. Pola ini konsisten baik di perkotaan maupun di perdesaan (lihat Tabel 4.13).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa akses terhadap fasilitas jamban pribadi masih menjadi tantangan bagi rumah tangga miskin, yang cenderung lebih sering menggunakan jamban umum atau tidak memiliki akses jamban sama sekali. Ketidaktersediaan sanitasi memadai dapat berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kesehatan dan kenyamanan, serta meningkatkan risiko penyebaran penyakit (WHO, 2024).

Tabel 4.13 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Jenis Jamban Rumah Tangga, 2025

Jenis Jamban	Rumah Tangga Miskin			Rumah Tangga Tidak Miskin			Head Count Index (HCI)		
	K	D	K + D	K	D	K + D	K	D	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jamban Sendiri	84,44	79,33	81,72	92,48	88,75	90,99	4,94	8,02	6,16
Jamban Bersama/ Komunal	7,81	5,72	6,69	5,11	3,95	4,65	7,99	12,38	9,53
Jamban Umum/ Tidak ada ¹	7,76	14,95	11,59	2,41	7,30	4,36	15,45	16,66	16,26

Catatan:
¹ termasuk rumah tangga yang mempunyai jamban tetapi tidak digunakan
K = Perkotaan D = Perdesaan K + D = Perkotaan + Perdesaan
Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

4.4.8 Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal

Persentase Rumah Tangga Tidak Miskin yang Menempati Rumah Sendiri Lebih Rendah Dibanding Rumah Tangga Miskin

Status kepemilikan rumah menjadi salah satu indikator penting dalam memahami profil kesejahteraan rumah tangga. Berdasarkan klasifikasi, kepemilikan rumah dibedakan menjadi rumah milik sendiri, kontrak/sewa, dan kategori lainnya (termasuk rumah dinas, milik famili, bebas sewa, dan sebagainya). Persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah milik sendiri tercatat sebesar 85,96 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rumah tangga tidak miskin yang sebesar 85,01 persen.

Perbedaan pola terlihat pada status kontrak/sewa dan kategori lainnya, di mana persentase rumah tangga tidak miskin cenderung lebih tinggi. Artinya, rumah tangga tidak miskin lebih sering memilih tinggal di rumah kontrak atau sewa, sedangkan rumah tangga miskin lebih sering memiliki tempat tinggal pribadi.

Nilai *Head Count Index* (HCI) terendah tercatat pada rumah tangga dengan status kontrak atau sewa sebesar 4,88 persen, menunjukkan bahwa rumah tangga miskin jarang menempati rumah kontrak/sewa. Sebaliknya, HCI tertinggi tercatat pada rumah tangga yang memiliki rumah sendiri, yakni sebesar 6,88 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin memiliki tempat tinggal pribadi meskipun dari sisi kualitas hunian kemungkinan masih terdapat keterbatasan.

Tabel 4.14 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Daerah dan Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal, 2025

Status Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga Miskin			Rumah Tangga Tidak Miskin			Head Count Index (HCI)		
	K	D	K + D	K	D	K + D	K	D	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sendiri	77,87	93,08	85,96	79,73	92,96	85,01	5,26	8,90	6,88
Kontrak/Sewa	6,72	1,02	3,69	8,09	0,98	5,25	4,51	9,25	4,88
Lainnya	15,41	5,90	10,35	12,18	6,06	9,74	6,72	8,68	7,21

Catatan:

K = Perkotaan

D = Perdesaan

K + D = Perkotaan + Perdesaan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2025

<https://www.bps.go.id>



BAB 5

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

PENGHITUNGAN DAN ANALISIS KEMISKINAN MAKRO DI INDONESIA TAHUN 2025



PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

- Kelompok pengeluaran terendah (Q1) mendominasi kelompok penerima PIP yaitu sebesar **24,18 persen**
- Program ini masih mencakup kelompok pengeluaran yang lebih tinggi dengan penerima bantuan di kuintil 5 sebanyak **4,60 persen**

BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)/ PROGRAM SEMBAKO

Penerima BPNT/Program Sembako pada **kelompok pendapatan bawah (D1-D5) sebesar 67,34%**



PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

- Rumah tangga pada kelompok 20 persen terbawah (Q1) memiliki persentase yang paling tinggi sebagai penerima PKH yaitu sebesar **25,99 persen**
- Masih terdapat penerima dari kuintil pengeluaran tertinggi (Q5) sebesar **3,63 persen**

Komitmen pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui program bantuan sosial. Berbagai jenis program bantuan sosial disalurkan sebagai bentuk *safety net* bagi penduduk yang rentan atau hidup di bawah garis kemiskinan. Program bantuan sosial dianggap mampu meningkatkan pendapatan atau pengeluaran masyarakat miskin dalam jangka pendek serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam jangka menengah dan panjang (Son, 2008).[1.1]

Bantuan sosial lazimnya memiliki berbagai bentuk seperti *cash transfer* (bantuan tunai) dan *in-kind transfer* (bantuan non tunai). Berbagai program bantuan sosial disalurkan oleh pemerintah pusat seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Bantuan Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dirancang untuk membantu mengurangi dampak ketidakpastian ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

5.1 Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Program Sembako Kartu Keluarga Sejahtera

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini diberikan dalam bentuk *e-voucher* yang disalurkan melalui Bank Himbara. *E-voucher* ini digunakan untuk membeli bahan pangan yang mengandung sumber karbohidrat seperti beras, dan sumber protein seperti telur dan daging ayam di e-warung terdekat. KPM bebas memilih bahan pangan yang akan dibeli tersebut.

Sebagian Besar Penerima BPNT/Program Sembako adalah Kelompok Menengah ke Bawah (D₁-D₅)

Tabel 5.1 Persentase Rumah Tangga Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako Menurut Desil Pengeluaran dan Daerah, 2025

Desil Pengeluaran Perkapita/Bulan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Desil 1 (D ₁)	17,90	11,84	15,03
Desil 2 (D ₂)	16,47	12,47	14,68
Desil 3 (D ₃)	15,22	11,87	13,84
Desil 4 (D ₄)	12,39	11,36	12,47
Desil 5 (D ₅)	11,36	10,91	11,32
Desil 6 (D ₆)	9,35	10,49	10,21
Desil 7 (D ₇)	7,21	9,31	8,76
Desil 8 (D ₈)	5,32	8,72	6,54
Desil 9 (D ₉)	3,45	7,10	4,88
Desil 10 (D ₁₀)	1,33	5,92	2,28
Seluruh Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

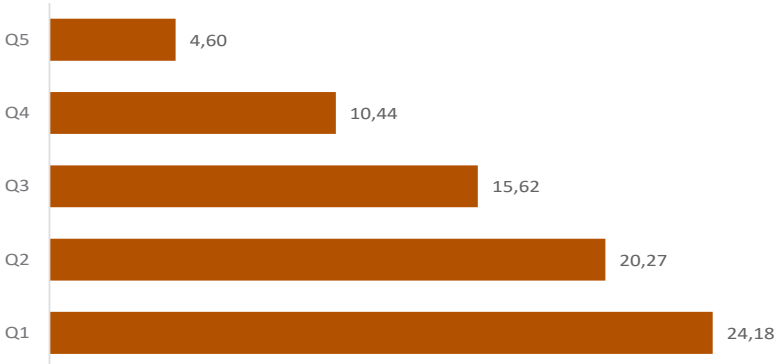
Pada tahun 2025, program bantuan ini masih diberikan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Setiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp200.000,00 per bulan. Besaran bantuan yang diterima masih sama dibanding tahun 2024. Tabel 5.1 menyajikan rumah tangga penerima BPNT/Program Sembako pada tahun 2025. Distribusi penerima BPNT memperlihatkan dominasi oleh rumah tangga dalam desil pendapatan rendah hingga menengah bawah (D1-D5) dengan persentase penerima yang cukup tinggi, mencapai total 67,34 persen. Penyaluran bantuan di D1-D5 lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan perdesaan. Sementara itu, program BPNT masih menjangkau sebagian kecil rumah tangga di kelompok desil atas. Penerima BPNT pada desil pengeluaran teratas (D8-D10) cenderung rendah atau kurang dari 10 persen).

Distribusi penerima BPNT berdasarkan desil pengeluaran menunjukkan keterjangkauan bantuan sosial yang sudah didistribusikan. Di satu sisi, cakupan penerima BPNT di desil teratas menunjukkan komitmen pemerintah atas inklusifitas bantuan sosial di tengah ketidakpastian ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain, perlu adanya upaya pemerintah untuk memastikan program bantuan sosial yang ada sudah tepat sasaran. Analisis ini juga menekankan pada pentingnya meminimalkan *inclusion* dan *exclusion error* untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial.

5.2 Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program ini ditujukan untuk memperluas akses pada seluruh jenjang pendidikan. PIP melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin atau anak yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian, PIP diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan kualitas SDM.

Masih Terdapat Penduduk Kelompok Atas yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

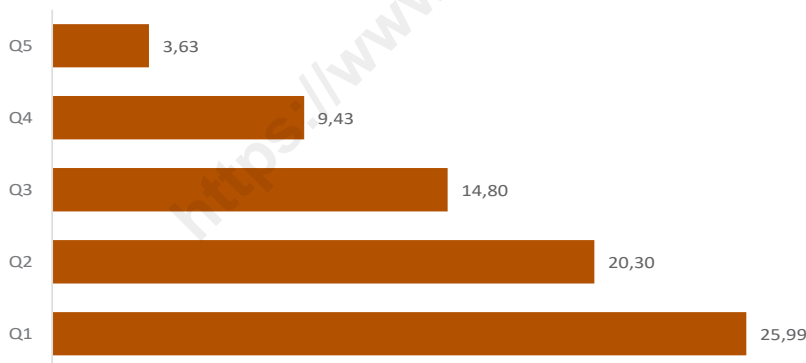
Gambar 5.1 Persentase Rumah Tangga Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Menurut Kuintil Pengeluaran per Kapita/Bulan, 2025

Dari gambar 5.1 di atas, terlihat bahwa kelompok pengeluaran terendah (Q1) mendominasi kelompok penerima PIP (24,18 persen). Persentase penerima PIP semakin menurun seiring dengan meningkatnya kuintil pengeluaran. Namun demikian, program ini juga mencakup kelompok pengeluaran yang lebih tinggi, dengan penerima bantuan di kuintil 5 sebanyak 4,60 persen. Tercakupnya penduduk di kuintil atas dalam bantuan PIP menunjukkan perlunya pemantauan lebih lanjut terkait efektivitas dan ketepatan sasaran dari PIP.

5.3 Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program PKH telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

Semakin Bawah Kelompok Kuintil Pengeluaran Semakin Tinggi Persentase Rumah Tangga Penerima PKH



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 5.2 Persentase Rumah Tangga Penerima Pogram Keluarga Harapan Menurut Kuintil Pengeluaran per Kapita/Bulan, 2025

Grafik penerima PKH menunjukkan pola yang serupa dengan program bantuan lainnya, yaitu dominasi penerima dari kelompok pengeluaran terendah (Q1), dengan persentase penerima sebesar 25,99 persen. Namun, masih terdapat penerima dari kuintil pengeluaran tertinggi (Q5) sebesar 3,63 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa, PKH telah berhasil menyasar keluarga miskin, akan tetapi tetap diperlukan penyaringan penerima bantuan yang lebih akurat guna meminimalkan *exclusion error* atau memastikan PKH menjangkau penduduk pada kelompok yang paling membutuhkan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik dan World Bank Institute. 2002. *Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Haughton & Khandker. 2009. *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington DC. Halaman 181.
- Haughton, Jonathan. 2001. *The Impact of the East Asian Crisis : Poverty Analysis Using Panel Data, Lecture notes prepared for the World Bank*. Boston : Suffolk University and Beacon Hill Institute.
- Lok-Dessallien, Renata. 2000. *Review of Poverty Concepts Indicators*.
- Nadeem T, Akhtar N, & Ahmad M. 2021. *A Study of the Relationship between Family Income and Literacy Level*. Journal of Statistics, Computing and Interdisciplinary Research.
- Ravallion, Martin. 1998. *Poverty Lines in Theory and Practice : Living Standards Measurement Study*. World Bank : Working Paper No. 13.
- Sen, Amartya. 1976. *Poverty: An Ordinal Approach to Measurement?* *Econometrica*, Vol. 46. pp.437-446.
- Son, H. H. 2008. *Conditional cash transfer programs: an effective tool for poverty alleviation?*.
- World Bank. 2000. *World Development Report 2000-2001*. Washington DC.
- WHO. 2024. *Sanitation*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sanitation> diakses pada 5 November 2024

Catatan Teknis



CATATAN TEKNIS

1. Literatur Kemiskinan

- Konsep kemiskinan erat kaitannya dengan *well-being* (kesejahteraan), yang mana didekati dengan konsep “kapabilitas” (Sen, 1976). Kapabilitas yang dimaksud mengacu pada teori pembangunan, yang artinya kemampuan untuk mencapai atau melakukan fungsi tertentu sebagai seorang individu. Individu yang kurang “kapabilitas” cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Menurut World Bank (2000), “*poverty is pronounced deprivation in well-being*” yang bermakna bahwa kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan. Dengan demikian, kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
- Kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks. Fenomena kemiskinan pada dasarnya bersifat multidimensi, tidak hanya mencakup dimensi moneter, tetapi juga nonmoneter seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dsb. Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya dilihat dari ketidakmampuan pendapatan/pengeluaran, tetapi juga bisa dilihat dari ketidakmampuan individu di aspek kebutuhan dasar lainnya.
- Secara konseptual, kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, di mana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Kemiskinan secara absolut mengacu pada standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non-makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. Sementara itu, standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal. Penduduk yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Karena ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk, tren angka kemiskinan absolut dan relatif dapat bergerak berlawanan arah (Lok-Dessallien, 2000). Sebagai contoh, kemiskinan relatif dapat menurun di saat kemiskinan absolut meningkat. Hal ini dapat terjadi jika kesenjangan antara strata ekonomi atas dan bawah berkurang akibat penambahan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- Konsep kemiskinan juga dapat diklasifikasikan menurut persepsi atas kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan dapat dilihat dari persepsi objektif maupun subjektif. Kemiskinan dari persepsi objektif mencakup penilaian normatif atas kondisi kemiskinan, sedangkan pendekatan subjektif menggunakan preferensi individu atas bagaimana dirinya menilai kemiskinan itu sendiri. Secara umum, kemiskinan

lebih mudah diukur sisi objektif daripada sisi subjektif.

- ≈ Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan terbagi menjadi 2 macam, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.
 - a. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan.
 - b. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkat kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".
- ≈ *United Nations Development Program* (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian "tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik" sebagai salah satu indikator kemiskinan.
- ≈ Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Terminologi Kemiskinan Lainnya

Soetandyo Wignjosoebroto dalam "Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan" yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan "Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktural, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan". Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut mestinya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat.

2. Metode Penghitungan Kemiskinan

2.1 Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs method*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

2.2 Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsumsi dan Pengeluaran dan Susenas KOR yang dilaksanakan pada bulan Maret 2025. Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non-makanan. Untuk penimbang data Susenas (*weight*) yang digunakan pada tahun 2025 merupakan penimbang proyeksi penduduk hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015..

2.3 Metode

- Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) secara matematis:

$$GK = GKM + GKNM$$

- Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

- Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di pedesaan.

2.4 Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

- Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sementara. Garis kemiskinan sementara adalah Garis Kemiskinan periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK dapat diartikan sebagai indeks harga dari biaya sekumpulan barang konsumsi yang masing-masing diberi bobot menurut proporsi belanja masyarakat untuk komoditi yang bersangkutan. IHK mengukur harga sekumpulan barang tertentu (seperti bahan makanan pokok, sandang, perumahan, dan aneka barang dan jasa) yang dibeli konsumen. Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.
- GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah:

$$GKM^*_{jp} = \sum_{k=1}^3 P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^3 V_{jkp}$$

- GKM^*_{jp} : Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p
- P_{jkp} : Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p
- Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p
- V_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p
- j : Daerah (perkotaan atau pedesaan)
- p : Provinsi ke- p

- Selanjutnya untuk memperoleh GKM tersebut dilakukan penyetaraan harga 2100 kilokalori dengan cara mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sebagai berikut:

$$\frac{K_{jkp}}{\overline{HK}_{jp}}$$

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

K_{jkp} : Kalori dari komoditi k di daerah j di provinsi p
 $\overline{HK}_{jp}$: Harga rata-rata kalori di daerah j di provinsi p

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

GKM : Kebutuhan minimum makanan di daerah j , yaitu yang menghasilkan energi yang setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari

j : Daerah (perkotaan atau perdesaan)

p : Provinsi ke- p

- GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil SPKKD 2004, yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_k V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$: Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j dan provinsi p

V_{kjp} : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p

r_k : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j

k : Jenis komoditi non-makanan terpilih

j : Daerah (perkotaan atau perdesaan)

p : Provinsi ke- p

- Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p} \times 100\%$$

$\%PM_p$: % Penduduk miskin di provinsi p

PM_p : Jumlah penduduk miskin di provinsi p

P_p : Jumlah penduduk di provinsi p

- Penduduk miskin untuk level nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin provinsi atau:

$$PM_I = \sum_{p=1}^n PM_p$$

PM_I : Jumlah penduduk miskin Indonesia

PM_p : Jumlah penduduk miskin di provinsi p

n : Jumlah provinsi

- Persentase penduduk miskin nasional adalah:

$$\%PM_I = \frac{PM_I}{P_I} \times 100\%$$

$\%PM_I$: Persentase penduduk miskin (secara nasional)

PM_I : Jumlah penduduk miskin Indonesia

P_I : Jumlah penduduk Indonesia

2.5 Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

1. Pertama, *Head Count Index* (HCI- P_0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2. Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

- Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

α : 0, 1, 2

z : Garis kemiskinan

y_i : Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$

q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk

- Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) dan jika $\alpha=2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2).

3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum Simon Kuznets menyampaikan hipotesisnya. Pareto (1897), setelah melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distribusi normal, tapi mengikuti perumusan sebagai berikut:

$$A = \frac{N}{X^b}$$

A : jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih besar daripada X

N : jumlah penduduk total

b : parameter yang nilainya antara 1 dan 2

Pareto menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk yang terkaya mendapatkan porsi yang terbanyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini selanjutnya dikenal sebagai *Pareto Law*, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok penduduk terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran.

Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai pendekatan pendapatan yang bersumber dari data Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan empat ukuran untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (*Gini Ratio*), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks-L.

3.1 Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus koefisien Gini adalah sebagai berikut :

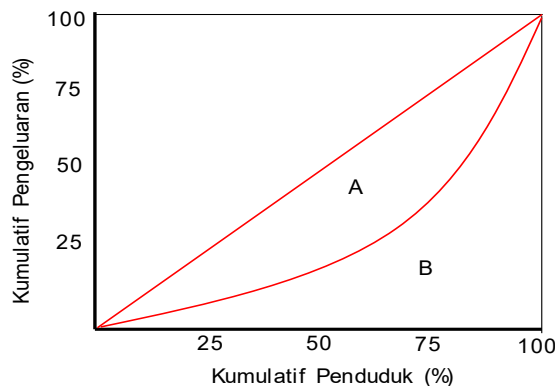
$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$

G : Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

X_k : Proporsi kumulatif dari penduduk untuk $k = 0, 1, 2, \dots, n$
dengan $X_0 = 0$ dan $X_1 = 1$

Y_k : Proporsi kumulatif dari pengeluaran untuk $k = 0, 1, 2, \dots, n$
dengan $Y_0 = 0$ dan $Y_1 = 1$

Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.



Gambar 6.1
Koefisien Gini
Menurut Kurva
Lorentz

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz (Gambar 6.1), yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari kelompok termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

1. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
2. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
3. Simetris. Jika antarpenduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
4. Sensitivitas Transfer Pigou–Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari penduduk kaya ke penduduk miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

1. Dapat didekomposisi
Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antarkelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (sub-grup).
2. Dapat diuji secara statistik
Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antarwaktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap* interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

3.2 Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

3.3 Indeks Theil dan Indeks-L

Ada sejumlah ukuran ketimpangan yang memenuhi semua kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik (di atas). Diantaranya yang paling banyak digunakan adalah Indeks Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). Kedua ukuran tersebut masuk dalam famili ukuran ketimpangan "*generalized entropy*". Rumus "*generalized entropy*" secara umum dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha-1)} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)^\alpha - 1 \right]$$

$\bar{y}$: adalah rata-rata pendapatan (pengeluaran)

Nilai GE bervariasi antara 0 dan ∞ dengan 0 mewakili distribusi yang merata dan nilai yang lebih tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Parameter α dalam kelompok ukuran GE mewakili penimbang yang diberikan pada jarak antara pendapatan pada bagian yang berbeda dari distribusi pendapatan. Untuk nilai α yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan untuk nilai α yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan yang berakibat pada ekor atas dari distribusi (penduduk kaya). Nilai α yang paling umum digunakan adalah 0 dan 1.

- GE (1) disebut sebagai indeks Theil, yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE(1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right) \ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$$

- GE (0), juga dikenal dengan indeks-L, disebut ukuran deviasi log rata-rata (*mean log deviation*) karena ukuran tersebut memberikan standar deviasi dari log (y):

$$GE(0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{\bar{y}}{y_i} \right)$$



LAMPPIRAN

Lampiran 1 Daftar Komoditi Kebutuhan Dasar Makanan, Maret 2025

Jenis Komoditi	Satuan	Nilai (Rp/kap/bln)		Kandungan Kalori	
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Beras	kg	72.186	85.800	731,91	819,45
Beras ketan	kg	142	208	1,17	1,55
Jagung pipilan/beras jagung	kg	219	629	2,81	8,76
Tepung terigu	kg	1.864	2.035	19,43	21,16
Ketela pohon/singkong	kg	1.761	2.672	16,27	22,86
Ketela rambat/ubi	kg	1.013	3.436	7,24	15,50
Gaplek	kg	32	79	0,49	1,30
Tongkol/tuna/cakalang	kg	5.162	5.930	7,09	8,49
Kembung	kg	3.043	2.385	3,06	2,59
Teri	kg	528	577	0,55	0,66
Bandeng	kg	1.589	1.774	2,12	2,56
Mujair	kg	1.640	1.713	1,55	1,61
Daging sapi	kg	947	458	0,61	0,29
Daging babi	kg	317	1.615	0,57	2,47
Daging ayam ras	kg	14.464	10.259	46,38	31,66
Daging ayam kampung	kg	985	2.596	2,18	5,36
Tetelan	kg	147	66	0,14	0,06
Telur ayam ras	butir	15.412	12.473	24,05	18,37
Telur itik/telur itik manila	butir	116	175	0,20	0,27
Kental manis	397 gram	1.851	1.863	7,47	6,93
Susu bubuk	kg	2.245	1.412	5,16	3,14
Bayam	kg	2.025	1.807	0,77	0,75
Buncis	kg	550	590	0,47	0,57
Kacang panjang	kg	1.177	1.440	1,03	1,42
Tomat	kg	1.967	1.785	1,07	1,03
Daun ketela pohon	kg	859	2.021	2,51	6,13
Nangka muda	kg	192	274	0,29	0,55
Bawang merah	kg	6.148	6.848	2,57	2,70
Cabe merah	kg	5.031	4.699	1,06	0,98
Cabe rawit	kg	5.303	6.407	3,59	4,37
Kacang tanah tanpa kulit	kg	280	309	1,76	1,89
Tahu	kg	5.891	4.958	15,98	13,23
Tempe	kg	6.065	5.211	27,02	22,74
Mangga	kg	379	368	0,33	0,35
Salak	kg	980	1.057	5,26	5,36
Pisang	kg	1.435	909	2,96	2,07
Pepaya	kg	1.966	1.365	3,04	2,49
Minyak kelapa	liter	361	343	5,09	4,44
Kelapa	butir	1.162	2.079	8,21	18,20
Gula pasir	ons	6.088	8.262	39,42	53,47

Lanjutan Lampiran 1

Jenis Komoditi	Satuan	Nilai (Rp/kap/bln)		Kandungan Kalori	
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gula merah	ons	684	792	3,99	4,60
Teh bubuk & teh celup (<i>sachet</i>)	ons & 2 gram	1.771	1.901	0,87	0,98
Kopi bubuk & kopi instan (<i>sachet</i>)	ons & 20 gram	7.846	7.445	17,26	16,08
Garam	gram	1.088	1.616	0,00	0,00
Kemiri	gram	796	784	2,73	2,63
Terasi/petis	gram	788	805	0,84	0,87
Kerupuk mentah	ons	1.303	1.172	8,60	7,90
Mie instan	80 gram	8.461	7.174	39,40	32,64
Roti	potong	7.177	6.339	20,84	21,36
Kue kering/biskuit	ons	5.573	4.291	24,67	19,84
Kue basah	buah	6.783	6.391	21,30	21,64
Rokok kretek filter	batang	36.741	34.422	0,00	0,00
Jumlah	–	252.537	262.019	1.143,44	1.246,31
Setara 2100 kkalori	–	463.801	441.494	220,86	210,24

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Lampiran 2 Daftar Komoditi Kebutuhan Dasar Bukan Makanan, Maret 2025

Jenis Komoditi	Kebutuhan dasar bukan makanan per kapita	
	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(3)	(4)
Perumahan	57.335	52.174
Listrik	16.262	8.828
Air	2.860	1.265
Minyak tanah	334	209
Kayu bakar	1.046	2.645
Obat nyamuk, korek api, baterai, aki, dsb.	1.387	1.278
Pos dan benda pos	16	27
Perlengkapan mandi	8.256	6.692
Barang kecantikan	2.820	2.263
Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	4.982	4.231
Sabun cuci	3.018	4.395
Pendidikan	13.035	7.234
Kesehatan	4.537	4.223
Bahan pemeliharaan pakaian	2.390	1.726
Pemeliharaan kesehatan	355	159
Bensin	19.282	17.575
Angkutan	4.308	2.288
KTP, SIM, akte kelahiran, fotokopi, foto, dsb.	127	89
Pakaian jadi laki-laki dewasa	3.704	3.334
Pakaian jadi perempuan dewasa	4.360	3.941
Pakaian jadi anak-anak	3.613	3.247
Keperluan menjahit	207	195
Alas kaki	2.144	2.210
Tutup kepala	771	771
Handuk, ikat pinggang, dsb.	366	419
Perlengkapan perabot rumah tangga	146	320
Perkakas rumah tangga	250	425
Alat-alat dapur/makan	238	559
Arloji/jam, kamera, dll.	25	19
Tas, koper, dsb.	135	125
Mainan anak dan perbaikannya	430	412
Pajak Bumi dan Bangunan	600	557
Pajak kendaraan bermotor	3.544	3.126
Pungutan/retribusi	1.466	607
Perayaan hari raya agama	211	188
Upacara agama atau adat lainnya	1.199	1.100
Jumlah	165.760	138.855

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Lampiran 3 *Sampling Error* Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan Menurut Provinsi, Maret 2025

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	8,54	0,76	8,92	7,04	10,03	1,85	5.373
Sumatera Utara	7,10	0,52	7,34	6,07	8,12	4,51	9.005
Sumatera Barat	3,91	0,45	11,49	3,03	4,79	2,01	5.571
Riau	5,75	0,69	11,93	4,40	7,09	3,20	3.517
Jambi	9,52	1,18	12,35	7,22	11,82	2,48	2.537
Sumatera Selatan	9,10	0,82	8,97	7,50	10,70	3,40	4.047
Bengkulu	12,34	1,25	10,14	9,89	14,79	1,25	1.531
Lampung	7,49	0,76	10,11	6,00	8,97	3,09	3.947
Bangka Belitung	3,89	0,64	16,50	2,63	5,15	1,23	2.263
Kepulauan Riau	4,13	0,60	14,41	2,97	5,30	2,68	2.680
DKI Jakarta	4,28	0,50	11,67	3,30	5,25	8,08	5.079
Jawa Barat	6,76	0,31	4,65	6,14	7,37	8,04	19.843
Jawa Tengah	9,10	0,35	3,90	8,41	9,80	3,57	19.386
DI Yogyakarta	10,16	0,77	7,54	8,66	11,66	2,48	3.190
Jawa Timur	7,00	0,31	4,46	6,39	7,62	4,29	19.958
Banten	5,58	0,57	10,13	4,47	6,69	8,33	5.618
Bali	3,27	0,39	12,04	2,50	4,04	2,05	3.972
NTB	12,02	0,79	6,58	10,47	13,56	2,12	3.877
NTT	7,68	0,85	11,07	6,01	9,35	1,97	2.313
Kalimantan Barat	4,48	0,70	15,64	3,11	5,85	2,90	3.147
Kalimantan Tengah	5,46	0,75	13,76	3,99	6,93	1,69	3.258
Kalimantan Selatan	3,43	0,71	20,54	2,05	4,82	4,19	3.983
Kalimantan Timur	4,16	0,66	15,93	2,86	5,46	3,63	3.973
Kalimantan Utara	5,27	1,05	19,83	3,22	7,32	1,30	1.377
Sulawesi Utara	4,25	0,65	15,37	2,97	5,53	1,89	3.773
Sulawesi Tengah	6,98	0,93	13,30	5,16	8,80	1,79	2.152
Sulawesi Selatan	5,14	0,51	9,87	4,15	6,14	2,86	5.507
Sulawesi Tenggara	6,42	0,73	11,36	4,99	7,85	1,20	2.294
Gorontalo	4,68	1,01	21,58	2,70	6,66	1,61	1.448
Sulawesi Barat	8,35	1,48	17,74	5,45	11,25	1,04	817
Maluku	4,36	0,75	17,27	2,88	5,83	1,41	2.096
Maluku Utara	5,95	1,17	19,72	3,65	8,24	1,17	1.535
Papua Barat	9,22	1,53	16,55	6,23	12,21	0,55	1.196
Papua Barat Daya	8,98	2,44	27,15	4,20	13,76	2,91	707
Papua	6,58	1,12	16,95	4,39	8,77	1,34	1.797
Papua Selatan	4,12	1,61	39,14	0,96	7,29	1,59	556
Papua Tengah	5,51	1,54	27,96	2,49	8,53	1,43	734
Papua Pegunungan	13,00	5,78	44,46	1,67	24,34	2,92	99
INDONESIA	6,73	0,12	1,84	6,48	6,97	4,99	164.156

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Lampiran 4 Sampling Error Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaan Menurut Provinsi, Maret 2025

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	14,44	0,68	4,72	13,10	15,77	1,69	8.303
Sumatera Utara	7,71	0,41	5,35	6,90	8,52	1,91	12.368
Sumatera Barat	6,93	0,55	7,94	5,85	8,00	1,60	6.009
Riau	6,43	0,64	10,01	5,17	7,70	3,76	5.046
Jambi	6,01	0,61	10,18	4,81	7,21	2,03	4.650
Sumatera Selatan	10,79	0,59	5,49	9,63	11,95	2,50	7.757
Bengkulu	11,95	0,84	7,06	10,30	13,60	1,14	4.416
Lampung	11,32	0,67	5,88	10,02	12,63	3,13	6.829
Bangka Belitung	6,59	0,94	14,29	4,74	8,44	1,12	1.984
Kepulauan Riau	8,33	1,38	16,61	5,62	11,04	0,59	1.476
DKI Jakarta							
Jawa Barat	8,15	0,68	8,39	6,81	9,49	7,56	4.800
Jawa Tengah	9,92	0,45	4,55	9,04	10,80	4,54	9.889
DI Yogyakarta	10,46	1,50	14,31	7,53	13,39	2,92	749
Jawa Timur	12,86	0,50	3,87	11,88	13,83	4,69	11.523
Banten	5,89	1,10	18,76	3,73	8,06	6,61	1.449
Bali	4,97	0,81	16,25	3,39	6,55	2,07	2.280
NTB	11,51	0,91	7,87	9,73	13,29	2,57	3.231
NTT	22,66	0,67	2,94	21,35	23,96	1,32	10.750
Kalimantan Barat	7,22	0,57	7,87	6,11	8,34	1,94	6.188
Kalimantan Tengah	4,97	0,58	11,68	3,83	6,10	1,38	5.026
Kalimantan Selatan	4,25	0,48	11,19	3,32	5,18	1,51	4.702
Kalimantan Timur	7,48	1,19	15,98	5,14	9,82	2,95	2.493
Kalimantan Utara	5,98	1,07	17,84	3,89	8,07	0,70	1.267
Sulawesi Utara	9,95	0,85	8,57	8,28	11,63	1,11	4.735
Sulawesi Tengah	12,93	0,74	5,75	11,47	14,39	1,30	5.671
Sulawesi Selatan	9,88	0,53	5,35	8,84	10,91	1,82	10.325
Sulawesi Tenggara	13,13	0,73	5,54	11,71	14,55	1,00	7.021
Gorontalo	20,80	1,49	7,18	17,87	23,73	1,08	2.119
Sulawesi Barat	10,94	0,90	8,25	9,17	12,70	1,19	2.758
Maluku	24,61	1,14	4,65	22,36	26,85	0,88	3.912
Maluku Utara	5,76	0,67	11,57	4,45	7,07	0,94	3.653
Papua Barat	25,88	1,75	6,78	22,44	29,32	0,70	2.132
Papua Barat Daya	29,71	1,62	5,46	26,54	32,89	0,38	2.175
Papua	38,47	1,69	4,39	35,16	41,78	0,52	2.553
Papua Selatan	28,86	1,79	6,22	25,34	32,37	0,65	1.487
Papua Tengah	36,54	1,27	3,46	34,06	39,02	0,66	3.578
Papua Pegunungan	31,36	1,12	3,59	29,15	33,56	0,75	4.000
INDONESIA	11,03	0,15	1,33	10,74	11,32	3,07	179.304

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Lampiran 5 *Sampling Error* Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan + Perdesaan Menurut Provinsi, Maret 2025

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	12,33	0,52	4,20	11,32	13,34	1,73	13.676
Sumatera Utara	7,36	0,35	4,73	6,67	8,04	3,37	21.373
Sumatera Barat	5,35	0,35	6,60	4,65	6,04	1,76	11.580
Riau	6,16	0,47	7,69	5,23	7,09	3,55	8.563
Jambi	7,19	0,57	7,91	6,07	8,30	2,23	7.187
Sumatera Selatan	10,15	0,48	4,74	9,20	11,09	2,81	11.804
Bengkulu	12,08	0,70	5,80	10,71	13,45	1,18	5.947
Lampung	10,00	0,51	5,09	9,00	11,00	3,11	10.776
Bangka Belitung	5,00	0,54	10,84	3,94	6,06	1,17	4.247
Kepulauan Riau	4,44	0,56	12,67	3,33	5,54	2,41	4.156
DKI Jakarta	4,28	0,50	11,67	3,30	5,25	8,08	5.079
Jawa Barat	7,02	0,29	4,07	6,46	7,58	7,94	24.643
Jawa Tengah	9,48	0,28	2,98	8,92	10,03	4,03	29.275
DI Yogyakarta	10,23	0,68	6,69	8,89	11,57	2,59	3.939
Jawa Timur	9,50	0,28	2,93	8,95	10,04	4,50	31.481
Banten	5,63	0,50	8,95	4,65	6,62	8,01	7.067
Bali	3,72	0,36	9,68	3,01	4,43	2,06	6.252
NTB	11,78	0,60	5,07	10,61	12,95	2,33	7.108
NTT	18,60	0,55	2,94	17,53	19,67	1,41	13.063
Kalimantan Barat	6,16	0,44	7,16	5,30	7,03	2,21	9.335
Kalimantan Tengah	5,19	0,46	8,95	4,28	6,10	1,53	8.284
Kalimantan Selatan	3,84	0,43	11,14	3,00	4,67	2,72	8.685
Kalimantan Timur	5,17	0,59	11,38	4,01	6,32	3,33	6.466
Kalimantan Utara	5,54	0,77	13,87	4,03	7,04	1,06	2.644
Sulawesi Utara	6,71	0,52	7,82	5,68	7,74	1,39	8.508
Sulawesi Tengah	10,92	0,59	5,36	9,77	12,07	1,40	7.823
Sulawesi Selatan	7,60	0,37	4,86	6,87	8,32	2,18	15.832
Sulawesi Tenggara	10,54	0,53	5,05	9,50	11,58	1,06	9.315
Gorontalo	13,24	0,94	7,12	11,39	15,08	1,16	3.567
Sulawesi Barat	10,41	0,78	7,49	8,88	11,94	1,17	3.575
Maluku	15,38	0,74	4,83	13,92	16,84	0,97	6.008
Maluku Utara	5,81	0,58	10,03	4,67	6,96	1,01	5.188
Papua Barat	20,66	1,31	6,36	18,09	23,24	0,67	3.328
Papua Barat Daya	17,95	1,52	8,48	14,97	20,93	1,11	2.882
Papua	19,16	1,02	5,31	17,17	21,16	0,73	4.350
Papua Selatan	19,71	1,33	6,74	17,11	22,32	0,73	2.043
Papua Tengah	28,90	1,08	3,72	26,79	31,01	0,72	4.312
Papua Pegunungan	30,03	1,12	3,74	27,83	32,24	0,82	4.099
INDONESIA	8,47	0,09	1,12	8,28	8,66	3,98	343.460

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax. : (021) 3863816

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

ISSN 2502-7484



9 772502 748001 >